

2. HUBUNGAN JEPANG-KOREA UTARA

Jepang dan Korea Utara merupakan dua negara yang terletak di Asia Timur. Berdasarkan lingkungan geografis, selain dua negara ini, negara lain yang berada di kawasan Asia Timur adalah Cina dan Korea Selatan. Jika dikaitkan dengan kepentingan strategis politik, melibatkan juga Amerika Serikat dan Rusia. Berbagai permasalahan yang terdapat di Asia Timur, baik yang merupakan masalah masa lalu maupun persoalan politik yang baru muncul, mengandung banyak persoalan yang bersifat sensitif yang dapat berkembang dan menjadi gangguan terhadap stabilitas kawasan.

Salah satu persoalan yang muncul di Asia Timur adalah persoalan antara Jepang dan Korea Utara yang hingga kini normalisasi hubungan diantara kedua negara belum terlaksana. Permasalahan antara Jepang dan Korea Utara bukanlah permasalahan politik yang baru muncul, permasalahan ini telah muncul sejak tahun 1500-an di saat Jepang ingin menguasai Korea untuk memperluas wilayahnya (Beasley, 1991, p.42).

Pendudukan Jepang di Semenanjung Korea berlangsung hingga tahun 1945. Berakhirnya pendudukan ini adalah akibat kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia II ketika bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Di awal kemerdekaan Korea, akibat banyaknya campur tangan dari negara-negara yang merasa memiliki kepentingan di Semenanjung Korea, mengakibatkan buruknya situasi politik pada saat itu. Keadaan ini lah yang menimbulkan kekacauan di dalam negeri Korea yang kemudian menyebabkan terjadinya Perang Korea.

Berakhirnya Perang Korea menyebabkan terbaginya Semenanjung Korea menjadi dua. Yaitu, *Republic of Korea* (ROK) atau Korea Selatan dan *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) yang lebih dikenal dengan Korea Utara. Invasi yang dilakukan Jepang terhadap Korea hingga Perang Dunia II usai, menyebabkan hubungan Jepang dan Korea Utara sulit dinormalisasikan.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan bagi perbaikan hubungan terbentur dengan sejumlah permasalahan.

Hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan telah mengalami penormalisasian sejak tahun 1965 (Diplomatic Blue Book 2006, 2006, p.26). Sedangkan dengan Korea Utara, Jepang belum juga memiliki hubungan diplomatik secara resmi hingga saat ini. Salah satu penyebabnya adalah sejak berakhirnya Perang Korea yang menyebabkan terpisahnya Korea, Jepang hanya mengakui kedaulatan wilayah Korea Selatan saja dan tidak mengakui kedaulatan wilayah Korea Utara (Park, Koh dan Kwak, 1987, p.275). Jepang tidak mengakui wilayah Korea Utara adalah karena Jepang bersama dengan Amerika Serikat membantu Korea Selatan ketika Perang Korea terjadi dan juga disebabkan karena Jepang dan Amerika tidak menginginkan adanya negara komunis. Hal inilah yang membuat marah Korea Utara.

Tertutupnya negara Korea Utara terhadap dunia asing juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya mencapai perbaikan hubungan antara keduanya. Dalam berhubungan dengan negara lain, Korea Utara hanya memiliki hubungan dengan beberapa negara asing saja diluar negara komunis. Pada tahun 1960-an, Korea Utara hanya memiliki hubungan diplomatik dengan Mali, Guinea, Austria, Mesir, Indonesia, India dan Irak (Morley, 1981, p.40).

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan Jepang-Korea Utara dan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan sulitnya normalisasi hubungan kedua negara, maka akan dilihat terlebih dahulu mengenai sejarah hubungan Jepang dan Korea Utara.

2.1 Sejarah Pendudukan Jepang Atas Korea

Sejarah keberadaan Jepang di Korea telah ada sejak tahun 1500-an. Pada masa itu, Korea menjadi daerah perebutan antara Jepang dan Cina. Jepang ingin merebut Korea dari Cina yang memang telah berkuasa di Korea sejak sekitar tahun 110 Sebelum Masehi. Pada masa itu, negara Korea adalah negara kerajaan yang dipengaruhi oleh ajaran Buddha yang dibawa oleh Cina.

Meskipun merupakan negara yang merdeka, Korea mengakui Cina sebagai pelindungnya. Akibatnya, ketika Jepang mengadakan serangan ke Korea pada tahun 1592 dan tahun 1597, tentara Jepang dapat dikalahkan dengan bantuan Cina (*Ensiklopedi Nasional*, 1990, p.130). Dalam negeri Korea sendiri pada saat itu terdapat pertentangan antara golongan konservatif dan golongan progresif. Golongan konservatif banyak mendapat dukungan dari Cina dan sebaliknya golongan progresif mendapat bantuan dari Jepang. Pertentangan tersebut semakin meruncing dengan meletusnya Pemberontakan *Tonghak* di Korea yang mengakibatkan adanya campur tangan pihak asing. Akibat dari peristiwa tersebut, pecahlah perang Cina-Jepang I (1894-1895) (Agung, 2006, p.165).

Perang Jepang-Cina I berakhir dengan kemenangan Jepang dan diakhiri dengan Perjanjian *Shimonoseki* (Tahun 1895). Sejak saat itu pengaruh Jepang di Korea sangat kuat. Namun, setelah Jepang berhasil mengalahkan Cina, masalah Rusia yang juga ingin merebut Korea. Pada tahun 1800-an, Rusia juga mulai ambil bagian terhadap Korea. Kedudukan Korea yang strategis membuat Rusia hendak mewujudkan cita-citanya mencari pelabuhan bebas es (politik air hangat).⁵ Pada saat itu, Rusia telah berhasil mencapai Wladiwostok dan berhasil menanamkan pengaruhnya di Korea. Oleh karena itu, pecahlah perang Jepang-Rusia pada tahun 1904. Perang ini berakhir pada tahun 1905 dengan kemenangan Jepang dan perang ini diakhiri dengan Perjanjian *Portsmouth*. Dengan kemenangan ini, pengaruh Jepang di Korea semakin kuat. Kemudian pada tahun 1910, Korea dianeksasi oleh Jepang dan menjadi daerah pendudukan Jepang hingga akhir Perang Dunia II (Agung, 2006, p.165).

Pada masa pendudukan Jepang, seperti negara-negara lainnya, masyarakat Korea dihadapkan pada masalah perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Pemogokan, pemberontakan, gerakan-gerakan revolusioner pada masa itu dilakukan oleh kelompok-kelompok penentang imperialis Jepang. Mereka terutama dari kalangan buruh tani, mahasiswa, elit birokrat dan juga organisasi komunis pimpinan Kim Il Sung.⁶

⁵ Rusia menginginkan Manchuria (sebuah wilayah kuno di sebuah laut Tiongkok dekat perbatasan Korea Utara dan Rusia) karena politik air hangat mereka gunakan untuk mencari pelabuhan yang bisa digunakan sepanjang tahun dan terbebas dari es membeku pada musim dingin.

⁶ Kim Il Sung (15 April 1912-8 Juli 1994) adalah seorang politikus dari Korea yang merupakan pemimpin Korea Utara hingga akhir hayatnya. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun

Dalam Perang Dunia II, akhirnya Jepang harus bertekuk lutut kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dengan berakhirnya Perang Dunia II, maka berakhir pulalah pendudukan Jepang di Korea. Banyak negara-negara dikawasan Asia dan Afrika yang berhasil memerdekakan diri pasca Perang Dunia II, namun Korea bernasib lain. Masa depan Korea didominasi oleh negara-negara besar pemenang perang, bahkan akhirnya Korea harus terpecah menjadi dua. Hal inilah yang mengantarkan Korea ke dalam kancah Perang Korea.

2.2 Perang Korea

Setelah Perang Dunia II berakhir, tidak berarti dunia menjadi aman. Permasalahan lain yang muncul adalah pertentangan antara Blok Barat dibawah pimpinan Amerika Serikat dan Blok Timur dibawah pimpinan Uni Soviet. Pertentangan ini lebih dikenal dengan Perang Dingin. Korea termasuk salah satu negara yang menjadi korban (terpisah) Perang Dingin selain Vietnam dan Jerman.

Pada tanggal 8 Agustus 1945, Uni Soviet menyatakan perang kepada Jepang. Pasukan Uni Soviet menyerang pasukan Jepang melalui Semenanjung Korea dan mencapai garis batas 38⁰ Lintang Utara (LU). Dengan berperang selama 6 hari, Uni Soviet memperoleh kemenangan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah kepada sekutu dengan ketentuan (Agung, 2006, p.166):

- a. Pasukan Jepang yang berada disebelah Utara garis batas 38⁰ LU, menyerah kepada Uni Soviet.
- b. Pasukan Jepang yang berada disebelah Selatan garis batas 38⁰ LU, menyerah kepada Amerika Serikat.

1948 hingga 1972 dan menjadi Presiden pertama Korea Utara sejak tahun 1972. Namun posisinya yang paling berpengaruh adalah sebagai Sekretaris Jendral Partai Pekerja Korea. Bagi bangsa Korea Utara, Kim Il Sung dianggap sebagai orang yang berhasil melepaskan Korea Utara dari penjajahan. Kebijakan pertama Kim Il Sung yang sangat terkenal adalah meredistribusi tanah di Korea Utara, yakni sebuah praktik reformasi agrarian yang telah menjadi ciri khas dari paham komunis. Dalam konteks pemujaan kepribadian (*Personality Cult*), Kim secara resmi disebut sebagai *Great Leader* dan menurut konstitusi Korea Utara, beliau adalah "Presiden Abadi". Hari kelahirannya merupakan salah satu hari libur di Korea Utara.

Hal inilah yang menjadi dasar pembagian Korea. Pembagian dua Korea ini merupakan salah satu pemicu timbulnya Perang Korea. Selain itu, faktor lain yang memicu terjadinya Perang Korea adalah dikarenakan oleh adanya persaingan ideologi antara Amerika dan Uni Soviet.

Perang Korea yang berlangsung tahun 1950-1953, dapat dikatakan sebagai perang komunis dan anti komunis. Karena, awal perang ini terjadi dikarenakan Uni Soviet ingin menyebarkan ideologi komunisnya di Semenanjung Korea. Uni Soviet mulai memasuki wilayah utara Korea dan kemudian semakin meluaskan ideologinya hampir ke seluruh wilayah.

Melihat hal ini, Amerika Serikat mengeluarkan sebuah kebijakan politik luar negeri untuk menduduki Korea bagian selatan dalam rangka membendung penyebaran komunis Uni Soviet yang telah terlanjur menyebar dikawasan utara. Kemudian, para petinggi Amerika Serikat pada saat itu membuat sebuah *grand-design* untuk memecah Korea pada Garis Paralel 38^{0,7} dengan alasan untuk tetap mempertahankan posisi Seoul dari pengaruh Uni Soviet yang dirasa semakin kuat di bagian utara Korea (Srivastava, 1982, p.35).

Selanjutnya, untuk meneguhkan posisi di kawasan pendudukan, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling mendukung berdirinya sebuah rezim di daerah kekuasaan masing-masing. Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus 1948 membentuk *Republic of Korea* (Korea Selatan) ibu kota di Seoul, dengan Presiden Syngman Rhee seorang tokoh anti komunis, Sedangkan Uni Soviet pada tanggal 9 September 1948 membentuk *Democratic People's Republic of Korea* (Korea Utara) dipimpin oleh Kim Il Sung. Selain itu, sebab lain yang memicu terjadinya Perang Korea adalah akibat keputusan PBB yang hanya mengakui bahwa Korea Selatan adalah satu-satunya pemerintahan yang sah di Korea. Akibat adanya keputusan tersebut, membuat Korea Utara semakin membenci Korea Selatan dan juga Amerika Serikat (Agung, 2006, p.169). Korea Utara merasa hak-haknya

⁷ Garis Paralel 38 maksudnya adalah garis batas wilayah antara Korea Selatan dan Korea Utara pada Garis Lintang Utara 38⁰. Pada awalnya, Amerika dan Uni Soviet tidak menjadikan garis 38⁰ sebagai garis demarkasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Akan tetapi garis tersebut hanya merupakan batas wilayah untuk menerima tawanan perang Jepang pasca Perang Dunia II. Namun akhirnya garis tersebut berubah fungsi menjadi garis demarkasi antara pertahanan Amerika dan Uni Soviet. Dengan demikian, pembagian wilayah Korea menjadi dua bagian ini, menjadikan suatu garis pertikaian antara dua kekuatan. Lebih jauh, secara tidak langsung menghalangi cita-cita bangsa Korea untuk menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu.

tidak diakui oleh PBB. Dengan demikian Uni Soviet terus mendukung Korea Utara untuk mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan wilayah Korea seluruhnya.

Korea Utara yang telah berusaha mendapatkan simpati, akhirnya mengambil jalan dengan cara kekerasan dengan bantuan dari Uni Soviet. Pada 25 Juni 1950, pecahlah Perang Korea yang ditandai dengan invasi pasukan Korea Utara melewati garis paralel 38⁰ menuju Korea Selatan.

Setelah terjadi peperangan selama tiga hari, akhirnya Korea Utara berhasil menduduki Seoul dan berhasil memukul mundur pasukan Korea Selatan hingga Pusan (wilayah Korea Selatan). Kondisi seperti ini mengakibatkan Presiden Syngman Rhee beserta staf pemerintahannya meninggalkan Seoul dan pindah ke Taejon.

Pecahnya Perang Korea sangat mengejutkan dunia. Bagi Amerika, Perang Korea berarti juga perang Amerika, karena Amerika mengetahui bahwa di belakang Korea Utara ada campur tangan Uni Soviet. Dengan alasan membendung perluasan komunis di Asia dan juga memendung kekuatan Korea Utara, maka Amerika memutuskan untuk membantu Korea Selatan. Amerika mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB untuk melakukan sidang guna membicarakan permasalahan Korea. Usulan Amerika diterima oleh PBB dan sidang tersebut menghasilkan resolusi sebagai berikut (Srivastava, 1982, p.41):

- a. Mendesak Korea Utara agar segera menghentikan perang dan menarik mundur pasukan-pasukannya sampai garis batas 38⁰ Lintang Utara.
- b. Memberikan sanksi kepada Korea Utara apabila pihak Korea Utara tidak memperdulikan desakan tersebut, maka PBB dengan para anggotanya akan membantu Korea Selatan.

Amerika mengirimkan pasukan perlindungan ke Korea Selatan pada tanggal 27 Juni 1950. Pasukan ini dipusatkan pada semenanjung seberang laut Jepang. Penempatan pasukan ini merupakan strategi militer Amerika yang bertujuan untuk membuat bendungan yang kuat disebelah Barat (Laut Kuning), sebelah Selatan (Laut Cina) dan sebelah Timur (Laut Jepang) untuk mengontrol agar Perang Korea tidak semakin meluas.

Meskipun Amerika telah menempatkan pasukannya di Semenanjung Korea, namun selama awal peperangan Korea Utara masih tetap unggul, hal ini disebabkan oleh, pertama, Korea Utara dan Uni Soviet mampu merebut simpati rakyat Korea Selatan. Korea Utara dibawah Kim Il Sung berikrar untuk menyatukan Korea dan memperbaiki nasib rakyat Korea, sehingga pihak Selatan menjadi ragu-ragu dalam bertindak untuk menentukan nasib antara kebenaran yang dibawa Korea Utara dan Uni Soviet atau yang dibawa Amerika Serikat. Kedua, logistik pihak Korea Utara terpecah, sehingga sulit dihancurkan. Selain itu pihak Utara mengadakan penyusupan dan penyamaran yang sangat rapi untuk melemahkan pihak Selatan (Agung, 2006, p.171).

Namun, dengan bantuan Amerika dan PBB, Korea Selatan berbalik menjadi unggul. Pada 26 September 1950, Seoul kembali dapat direbut pihak Selatan. Kekalahan pihak Utara dapat juga dikatakan sebagai kekalahan Uni Soviet. Keadaan ini membuat RRC sebagai sekutu Uni Soviet tidak tinggal diam. Dalam penyerangan ini, pihak Cina mengerahkan 100.000 pasukan termasuk dua divisi yang datang dari Cina utara yang bekerja sama dengan angkatan perang Uni Soviet. Semenjak kedatangan Cina ke Korea Utara, kemenangan kembali berada dipihak Utara. Kekuatan PBB di Korea, mengalami kekalahan semenjak kedatangan pasukan RRC.

Situasi perang yang tidak pernah padam itu, mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk mengajukan perundingan untuk menghentikan peperangan. Tawaran ini akhirnya disepakati oleh pihak Utara dan Selatan, selanjutnya diadakan serangkaian perundingan dan gencatan senjata.

Perang Korea berakhir pada tahun 1953 dimana kedua pihak mencapai kesepakatan penghentian permusuhan yang ditanda tangani pada tanggal 27 Juli 1953. Sehingga Perang Korea berakhir dengan tidak ada yang menang atau kalah. Kesepakatan ini tertuang dalam dua poin utama, pertama, kedua negara yang berseteru menyepakati secara *de facto* garis paralel 38⁰ sebagai garis perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kedua, pihak yang berseteru juga akan melakukan pertukaran dan pengembalian para tawanan perang ke negaranya masing-masing. Akan tetapi, Perang Dingin yang diharapkan mereda seiring dengan tercapainya kesepakatan tersebut tidak kunjung terwujud hingga saat ini.

Zona demiliterisasi yang terdapat diperbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara, sepanjang kurang lebih 1000 Km, menjadi bukti atas masih berlangsungnya Perang Dingin antara Utara dan Selatan.

2.3 Normalisasi Hubungan Jepang dan Korea Utara

Permasalahan normalisasi hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Utara merupakan isu utama dalam kebijakan luar negeri Jepang pada era pasca Perang Dingin (Kim Hong, 2006, p.1). Pada kenyataannya, Korea Utara merupakan satu-satunya negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik secara formal dengan Jepang sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Hubungan yang “tidak normal” antara Tokyo dan Pyongyang membuat bertambah besarnya permasalahan pada saat perang dingin, yang membawa kedua negara ini kedalam dua sisi yang berlawanan. Jepang menyandarkan diri kepada Amerika Serikat untuk mengatasi permasalahan keamanan nasionalnya yang berada dibawah perjanjian keamanan Amerika-Jepang dan mengikuti kepemimpinan Amerika dalam berhubungan dengan Korea Utara.

Pada tahun 1950-an, telah terjalin hubungan dalam bidang perdagangan dikalangan pebisnis Jepang dan Korea Utara melalui warga negara Korea Utara yang menetap di Jepang (*Chosen Soren*) (Park, Koh dan Kwak, 1987, p.284). Walaupun hubungan ini bukanlah hubungan resmi pemerintahan, tetapi ini merupakan suatu langkah yang baik untuk membantu normalisasi hubungan. Sehingga pada tahun 1955, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengeluarkan sebuah pernyataan mengenai kemungkinan dibukanya hubungan diplomatik antar kedua negara (Park, Koh dan Kwak, 1987, p.281):

“The government of the Democratic People’s Republic of Korea, upholding the principle that it is possible for all states of different social system to live in peaceful coexistence, has been prepared to establish normal relations with all states which are desirous of having friendly relations with our country, first of all, to establish trade and cultural relations in conformity to mutual interest. For

Japan to establish the aforementioned relations with the Democratic People's Republic of Korea will not only conform to the vital interests of the Korean and Japanese peoples, but also greatly contribute to the preservation of peace in the Far East and the easing of International tensions”.

Terjemahan: “Pemerintah DPRK, menegaskan prinsip bahwa setiap negara walaupun memiliki perbedaan dalam sistem sosialnya dapat hidup secara berdampingan dengan damai, Korea Utara akan mempersiapkan normalisasi hubungan bagi setiap negara yang ingin menjalin hubungan dengan negara kita, terutama terhadap negara yang memiliki persamaan kepentingan dalam bidang perdagangan dan kebudayaan. Untuk Jepang, perbaikan hubungan dalam berbagai bidang dengan DPRK tidak hanya akan memenuhi kepentingan vital masyarakat Korea dan Jepang saja, tetapi juga mempunyai kontribusi yang besar untuk menjaga kedamaian di Timur Jauh dan ketentraman Internasional.”

Perdagangan dikalangan pebisnis mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Pada tahun 1957 mencapai angka US\$ 6 Juta dan mengalami puncaknya pada tahun 1964 yang mencapai US\$ 30 Juta. Tetapi setelah Tokyo menormalisasikan hubungannya dengan Seoul pada tahun 1965, volume pertumbuhan perdagangan turun drastis menjadi US\$ 7 Juta pada tahun 1966 (Nester, 1992, p.189). Normalisasi hubungan Jepang dan Korea Selatan tersebut bagi pihak Korea Utara, sama saja dengan Jepang mengakui adanya dua Korea di Semenanjung Korea. Ini bukanlah yang diinginkan oleh Korea Utara, karena sebenarnya Korea Utara menginginkan adanya reunifikasi dimana hanya ada satu Korea yang berada dibawah kekuasaan Korea Utara. Namun permasalahan ini tidak sampai membuat putusannya hubungan kedua negara dalam perdagangan.

Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan sejak berakhirnya Perang Korea, mengalami Perang Dingin. Kedua pihak sama-sama menginginkan

reunifikasi Korea, namun usaha kearah ini mengalami kesulitan karena beberapa perbedaan mendasar (*Ensiklopedi Nasional*, 1990, p.137-138). Perbedaan pertama berkaitan dengan organisasi dan politik negara kesatuan. Korea Utara menginginkan penyatuan dengan membentuk konfederasi. Eksistensi kedua negara tidak dihapus. Sebaliknya Korea Selatan menginginkan terlebarnya kedua negara dalam satu negara baru yang demokratis. Perbedaan kedua terletak dalam metode penyatuan. Utara ingin menutup segala prosedur demokrasi, sedangkan Selatan menghendaki langkah-langkah ke arah demokrasi melewati pembentukan rencana undang-undang serta pengesahannya melalui referendum.

Perbedaan ketiga terletak pada pendekatan penyatuan. Utara tidak menghendaki adanya kerja sama sebelum terbentuknya konfederasi. Selatan menghendaki dimulainya langkah-langkah kongkret dengan hubungan kerja sama diberbagai bidang hingga tercapai penyatuan demokratis. Perbedaan keempat berkaitan dengan Dewan Penyatuan Korea (DUK) dari pihak Selatan dan kongres Pan-Nasional dari Utara. Selatan menghendaki agar DUK terdiri atas anggota kedua belah pihak yang akan mengemukakan pandangannya masing-masing. Pemilihan para anggota disesuaikan dengan kehidupan politik di negara masing-masing, tanpa campur tangan pihak lain. Utara sebaliknya membuat batasan tentang siapa yang harus dipilih dari pihak selatan untuk mengikuti kongres Pan-Nasional. Selain itu, mereka akan diseleksi lagi oleh Utara. Pyongyang juga menghendaki bahwa untuk memperlancar setiap pertemuan, Selatan harus merubah kondisi juridis, politis, dan sosial terlebih dahulu.

Akibat Perang Dingin diantara dua Korea ini, mengakibatkan semakin sulit untuk menormalisasikan hubungan Jepang dan Korea Utara. Sebagai contoh pada tahun 1966, Korea Selatan mendesak pemerintah Jepang untuk mencabut visa tiga orang teknisi Korea Utara. Ketiga teknisi tersebut berada di Jepang dalam urusan pengecekan mesin-mesin yang rencananya akan dibeli Korea Utara. Hal ini menimbulkan kemarahan dari Korea Utara dan mengakibatkan dibatalkannya pembelian mesin tersebut, dan Korea Utara juga membatalkan seluruh kontrak perdagangan dengan Jepang (Nester, 1992, p.190).

Dalam menghadapi kedua negara ini, sepertinya Jepang tidak memiliki diplomasi yang kuat. Seperti pada tahun 1972, Perdana Menteri Tanaka

mengatakan bahwa Jepang akan mengembangkan hubungan “*Unofficial*” dengan Korea Utara dalam bidang non politik. Ia mengatakan bahwa Jepang akan mengakui kedaulatan dua Korea di Semenanjung Korea dan eksistensi keduanya untuk mencapai kesepakatan bersama. Tetapi di saat Korea Utara merespon mengajak Jepang untuk kearah hubungan yang lebih jauh lagi, Jepang dengan tegas menolaknya dan mengatakan bahwa pernyataan Perdana Menteri Tanaka tersebut bukan bertujuan “Untuk mengakui kedaulatan yang sama” (Nester, 1992, p.190). Dari sini dapat dilihat bahwa inisiatif Jepang terhadap Korea Utara terkadang seperti mendahului, kadang mengikuti, tetapi secara umum mengimbangi inisiatif dan aspirasi Korea Selatan.

Pada tahun 1970-an ini, hubungan kedua negara mulai kembali membaik. Dapat dikatakan tahun 1970-an merupakan tahun yang baik dimana hubungan Jepang dan Korea Utara mengalami normalisasi tidak hanya dalam bidang perdagangan saja, kedua negara juga melakukan perbaikan hubungan dalam bidang kebudayaan dimana secara berkala mengirimkan atlit, pelajar, budayawan dan media.

Perbaikan hubungan ini diawali oleh pernyataan Kim Il Sung agar Korea Utara kembali membina hubungan diplomatik dengan Jepang. Maka pada 15 November 1971, Chuji Kuno (Wakil dari Parlemen Perserikatan bagi Persahabatan Jepang-Korea Utara) bersama dengan delegasi lainnya mengunjungi Korea Utara untuk membuka kembali negosiasi perdagangan. Hasil dari kesepakatan ini, membawa dampak positif bagi perdagangan kedua negara. Perdagangan Jepang-Korea Utara kembali meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai puncaknya pada tahun 1974. Jepang mengekspor industri tanaman ke Korea Utara yang bernilai US\$ 573 Juta. Ini membuat Jepang menjadi *partner* perdagangan non komunis terbesar Korea Utara pada saat itu. Tokyo mengekspor 12 produk, seperti mesin, tanaman, otomotif dan alat-lat elektronik. Sedangkan Jepang mengimpor 20 tipe bahan mentah mulai dari batu bara hingga sutra (Nester, 1992, p.190).

Di era tahun 1980-an, hubungan Jepang dan Korea Utara tetap mengalami “naik turun” seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada 26 November 1982, Nakasone diangkat menjadi Perdana Menteri Jepang. Perdana Menteri Nakasone melakukan

kunjungan ke Seoul pada Januari 1983 sebagai kunjungan pertama Jepang-Korea Selatan. Tetapi kunjungan Nakasone tersebut dikritik Pyongyang sebagai sebuah kebijakan “Pro-Seoul, Anti Pyongyang”.

Pada tahun 1985, banyak kunjungan yang dilakukan oleh kedua negara untuk menormalisasikan hubungan. Kemajuan yang besar di tahun ini adalah untuk pertama kalinya pesawat udara Korea Utara diizinkan mendarat di Narita, Jepang. Pesawat tersebut membawa atlet Korea Utara untuk mengadakan pertandingan di Kobe. Dan pada tahun 1986, delegasi Jepang mengunjungi Pyongyang untuk bertemu dengan Presiden Kim Il Sung. Pada kesempatan tersebut, Jepang memberikan data mengenai kemungkinan diadakannya kerjasama didalam perusahaan Jepang.

Pada tahun 1987, Pesawat KAL 858 milik Korea Selatan meledak di atas Myanmar yang mengakibatkan tewasnya seluruh penumpang. Pelaku peledakan tersebut adalah Kim Hyon Hui, seorang warga negara Korea Utara yang menyamar sebagai turis Jepang. Ia mengatakan, ia mempelajari tingkah laku seperti layaknya orang Jepang dari seorang wanita yang diculik oleh Korea Utara (“Foreign Policy”, 1992, p.41). Korea Utara tidak membenarkan pengakuan Kim Hyon Hui tersebut. Hasil ini sangat mengejutkan dan kembali membawa kemunduran bagi hubungan kedua negara.

Pada era pasca Perang Dingin, sebenarnya Jepang telah mencoba mengurangi ketatnya kebijakan pemerintahannya terhadap Korea Utara sebagai usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungannya dengan Korea Utara. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor (Kim Hong, 2006, p.1-2). Pertama, Cina mulai mengadakan hubungan diplomasi tidak hanya dengan Korea Utara tetapi juga dengan Korea Selatan, Jepang menganggap dengan membuka hubungan diplomatik dengan Korea Utara dapat membawa Jepang kepada persaingan dengan kekuatan negara lain. Kedua, Jepang percaya bila hubungan Jepang dan Korea Utara terjalin dengan baik, maka akan mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea dan akan membawa kedamaian antara Utara dan Selatan Korea. Ketiga, Jepang ingin menguasai kekuatan ekonomi dunia. Oleh karena itu Korea Utara merupakan salah satu target Jepang. Keempat, adanya persoalan lain yang menjadi perhatian utama Jepang, yaitu mengenai program nuklir Korea

Utara, permasalahan kapal mata-mata Korea Utara yang melintasi wilayah teritorial Jepang dan mengenai masalah penculikan warga negara Jepang oleh agen rahasia Korea Utara, hal ini lah yang menjadi permasalahan utama bagi Jepang dalam normalisasi hubungannya dengan Korea Utara.

Normalisasi hubungan secara resmi antara kedua negara ini diawali dengan diadakannya pertemuan antara Jepang dan Korea Utara yang diwakili oleh *Liberal Democratic Party* (LDP), *Japan Socialist Party* (JSP) dan *Korean Workers Party* (KWP) pada bulan September 1990 (Kim Hong, 2006, p.2). Pertemuan tersebut berlangsung sebanyak delapan kali hingga tahun 1992. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai masalah-masalah yang selalu menjadi hambatan dalam normalisasi hubungan. Seperti masalah kompensasi perang pada masa kolonial Jepang di Korea, permasalahan penculikan warga Jepang oleh agen Korea Utara dan permasalahan nuklir Korea Utara yang juga menjadi permasalahan Internasional. Pembicaraan normalisasi hubungan ini terhenti pada November 1992. Meskipun pada bulan April hingga Oktober 2000 telah diadakan tiga kali pertemuan, namun terhenti kembali tanpa ada kejelasan mengenai isu-isu tersebut. Pada 29 dan 30 Oktober 2002, kembali diadakan pertemuan ke duabelas untuk membicarakan normalisasi hubungan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Salah satu permasalahan yang menjadi topik utama dalam pertemuan ini adalah mengenai program nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara. Sejak tahun 1985, Korea Utara dicurigai mengembangkan persenjataan nuklir secara rahasia. Namun Korea Utara menyangkal tuduhan tersebut. Kecurigaan berlanjut ketika pada tahun 1993, Korea Utara menolak kedatangan tim inspeksi dari IAEA (*International Atomic Energy Agency*) dan bahkan mengundurkan diri dari NPT (*Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons*) (Irsan, 2007, p.15). Korea Utara membangun reaktor atom yang memiliki kapasitas moderat (5-MWe *Reactor*) (“The Korean Peninsula”, 2007, P.91) dan mengembangkan senjata nuklir di Yongbyon, yang terletak di sebelah utara Pyongyang.

Pada tahun 1998, Korea Utara melakukan percobaan rudal tipe *No-dong* (jarak tempuh 1300 km) dan tipe *Taepo-dong* (jarak tempuh 1500 km) yang melewati wilayah Jepang dan jatuh di Lautan Pasifik. Pada tahun 2006 Korea

Utara kembali melakukan percobaan peluncuran rudal ke arah laut yang cukup dekat dengan wilayah Jepang.

Kemampuan rudal Korea Utara ini sangat mengkhawatirkan Jepang karena dapat memuat kandungan alat peledak berisi bahan kimia yang dapat mengancam daerah industri dan pemukiman penduduk di Jepang. Kecemasan Jepang juga karena meragukan keakuratan sasaran percobaan rudal tersebut, mengingat tingkat teknologi Korea Utara yang dapat dikatakan belum canggih sehingga dapat membahayakan wilayah Jepang.

Walaupun hubungan kedua negara ini mengalami 'jatuh bangun', namun kedua negara tetap menginginkan adanya normalisasi hubungan. Hal ini dapat dilihat pada saat pemerintahan Koizumi. Pemerintahan Koizumi Junichiro yang lebih menekankan kepada perbaikan ekonomi dalam negeri dari pada hubungan dengan luar negeri, mengejutkan banyak pihak ketika ia memutuskan untuk mengunjungi Pyongyang (Ibu Kota Korea Utara) untuk melakukan pertemuan dengan Kim Jong Il. Selama pemerintahannya, Koizumi mengunjungi Korea Utara sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2002 dan 2004.

Pada bulan Agustus 2002, diadakan pembicaraan antara kedua negara untuk mempersiapkan pertemuan puncak antara kedua pihak. Kedua negara menginginkan adanya kesepakatan timbal balik antara kedua negara. Pemerintah Jepang diwakili oleh Tanaka Hitoshi dan Wakil dari Korea Utara Ma Chol Su mempersiapkan pembicaraan mengenai dua isu sulit yang menghalangi normalisasi hubungan diplomatik antara Tokyo dan Pyongyang. Pertama, Korea Utara meminta Jepang untuk menyatakan persetujuan bantuan ekonomi bagi "persiapan" pada isu kompensasi. Kedua, Jepang juga meminta Korea Utara untuk memberikan informasi mengenai 'hilangnya' warga negara Jepang. Sebagai lanjutan dari pertemuan tersebut adalah diadakannya pertemuan puncak antara kedua petinggi negara. Pertemuan tersebut diadakan pada 17 September 2002 di Pyongyang, antara Perdana Menteri Koizumi Junichiro dan Ketua Komisi Pertahanan Korea Utara, Kim Jong Il (Diplomatic Blue Book 2003, 2003, p.16).

Pada pertemuan tersebut, Kim Jong Il mengakui pertanggung jawaban Korea Utara terhadap penculikan warga negara Jepang dan juga meminta maaf tidak akan melakukan kesalahan seperti ini lagi. Isu mengenai kasus penculikan

ini merupakan topik utama dalam tulisan ini, dan selanjutnya akan dibahas pada bab selanjutnya.

Pada pertemuan ini dihasilkan sebuah deklarasi yang berisi mengenai perjanjian Jepang-Korea Utara. Deklarasi ini dikenal dengan “Deklarasi Pyongyang” yang kemudian deklarasi inilah yang dijadikan dasar bagi normalisasi hubungan selanjutnya (Lampiran 1).

2.4 Permasalahan Yang Terjadi Antara Jepang dan Korea Utara

Kasus penculikan yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan permasalahan utama dalam pembicaraan mengenai normalisasi hubungan kedua negara. Kasus ini juga merupakan topik utama yang diangkat dalam tulisan ini. Oleh karena itu, kasus ini akan dibahas pada bab selanjutnya. Tetapi, selain permasalahan mengenai penculikan, terdapat juga permasalahan lain yang juga menjadi permasalahan kedua negara yang mempengaruhi sulitnya melakukan normalisasi hubungan kedua negara.

2.4.1 Kompensasi Perang

Bagi Korea Utara, hal utama yang harus dilakukan Jepang dalam usaha normalisasi hubungan kedua negara adalah memberikan kompensasi perang dalam bentuk keuangan dan Korea Utara juga menuntut pemerintah Jepang untuk meminta maaf atas masa kolonialnya tersebut.

Korea Utara menyatakan bahwa Jepang tidak adil, karena Jepang telah melakukan normalisasi hubungan dengan Korea Selatan sejak tahun 1965. Pada saat itu, Jepang memberikan kompensasi keuangan sebesar US\$800 juta ke Korea Selatan. Bantuan tersebut diberikan dalam tiga tahap; (1) bantuan keuangan senilai US\$300 juta, yang disalurkan dalam waktu periode 10 tahun; (2) bantuan US\$200 juta yang disalurkan dalam waktu periode 10 tahun dan akan dikembalikan dalam waktu 20 tahun dengan bunga 3.5% (3) US\$300 juta dalam bentuk kredit pribadi dari Bank Jepang dan institusi keuangan yang ada di Jepang selama periode 10 tahun (Manyin, 2003, p.16).

Tuntutan kompensasi perang yang dituntut oleh Korea Utara jauh lebih besar dibandingkan dengan yang diberikan kepada Korea Selatan. Yaitu sekitar US\$5 - US\$10 miliar. Korea Utara menganggap jumlah ini seimbang dengan apa yang telah dilakukan Jepang pada masa pendudukannya. Tetapi bagi Jepang hal ini dinilai berlebihan.

2.4.2 *Weapons of Mass Destructions (WMD)*

Permasalahan program WMD (Senjata Pemusnah Masal) yang dimiliki oleh Korea Utara merupakan permasalahan serius, dimana kasus ini menjadi kasus Internasional yang melibatkan banyak negara. Kepemilikan WMD oleh Korea Utara, merupakan sebuah kesalahan dimata Internasional.

Korea Utara secara rahasia membangun persenjataan nuklir sejak tahun 1980-an dan pada tahun 1993 menolak kedatangan tim inspeksi dari *International Atomic Energy Agency (IAEA)*. Korea Utara membangun reaktor atom yang memiliki kapasitas 5 Mega Watt yang terletak di Yongbyon sebelah utara Pyongyang (Niksch, 2008, p.1).

Terdapat dua alasan mengapa Korea Utara terus mengembangkan program nuklir ini (Sriyono, 2004, p.87-88). Pertama, pembekuan program nuklir yang bersumber pada Plutonium tahun 1994 tidak membuahkan hasil timbal balik yang diharapkan. Pyongyang menuduh Amerika Serikat mengingkari *Agreed Framework* 1994 yang disepakati dengan menunda pengapalan 500.000 ton minyak ke Korea Utara. Amerika Serikat berdalih, penundaan itu dilakukan karena Korea Utara terus menjalankan program HEU (*Highly Enriched Uranium Nuclear Program*). Pada tahun 1994, Amerika Serikat dan Korea Utara memang telah membuat suatu kesepakatan yang dituangkan dalam *Agreed Framework*, dengan kesepakatan bahwa Amerika Serikat akan memberikan suplai minyak sebagai energi alternatif kepada Korea Utara mulai tahun 1995 dan membantu membangun pusat tenaga listrik (Reaktor kecil) (Irsan, 2007, p.15).

Alasan kedua adalah Korea Utara berambisi untuk menjadi negara nuklir. Dengan memiliki senjata nuklir negara ini menyandang wibawa, mampu *survive*, dan memiliki sarana *blackmail*. Pyongyang berpendapat, kepemilikan senjata

nuklir merupakan hak negara berdaulat untuk mempertahankan kebebasan bangsa, keamanan negara, dan mencegah perang.

Atas dasar tersebut, Korea Utara menolak patuh pada ketentuan Internasional. Pengusiran tim inspeksi IAEA kembali dilakukan Korea Utara pada 31 Desember 2002 dan kemudian menarik diri dari NPT pada 9 Januari 2003.

WMD yang dimiliki Korea Utara ini menjadi permasalahan bagi Jepang adalah karena pada setiap percobaan peluncuran rudal, Korea Utara selalu mengarahkannya ke wilayah Jepang. Pada tahun 1998, Korea Utara meluncurkan percobaan rudal tipe *Nodong* dengan jarak tempuh 1300 Km dan *Taepodong 1* dengan jarak tempuh 1500 Km melewati (diatas) wilayah Jepang dan jatuh di Samudra Pasifik. Korea Utara juga mengembangkan *Taepodong 2* dan *Nodong* yang memiliki jarak tempuh sekitar 3.500-6.000 kilometer (“The National”, 2000, p.187). Pada tanggal 5 Juli 2006, Korea Utara meluncurkan 7 rudal tanpa memberi peringatan sebelumnya. Salah satu rudal tersebut ketika diluncurkan dari tempat percobaan peluncuran *Taepodong* di perairan timur Korea Utara, di perkirakan meledak di udara beberapa kilometer dari tanah tanpa terpisah dari penggerak roket utama dan jatuh ke tanah dekat tempat percobaan peluncuran tersebut beberapa saat setelah peluncurannya. Enam rudal lainnya diluncurkan dari Kittaeryong di perairan selatan Korea Utara dan berhasil mendarat di laut Jepang setelah terbang sejauh 400 kilometer. Keenam misil ini diperkirakan adalah tipe *Nodong* atau *Scud* yang diluncurkan dari TELs (*Transporter Erector Launcher*) (“The Korean Peninsula”, 2007, p.91).

Hal ini dilakukan Korea Utara adalah untuk memperlihatkan bahwa Korea Utara memiliki kemampuan untuk menyerang wilayah Jepang. Walaupun Korea Utara tidak menunjukan rudal ini tepat ke wilayah Jepang, tetapi Jepang khawatir dan meragukan keakuratan sasaran percobaan rudal tersebut, karena Jepang merasa tingkat teknologi Korea Utara dianggap masih belum canggih sehingga dapat membahayakan wilayah Jepang. Dan rudal ini juga dapat dijadikan teror oleh Korea Utara bagi rakyat sipil (*Japan and North*, 2005, p.7).

Pembicaraan mengenai penyelesaian kasus WMD ini, dilakukan dalam pertemuan *Six Party Talks* yang beranggotakan Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Cina, Korea Selatan dan Korea Utara.

2.4.3 Aktivitas Kriminal Korea Utara

Korea Utara diduga kuat memproduksi dan memperdagangkan obat-obat terlarang, mata uang palsu dan aktivitas kriminal lainnya. Aktivitas kriminal Korea Utara ini meliputi (1) Heroin dan Methamphetamines (2) Pemalsuan rokok (3) Pemalsuan obat-obat farmasi (4) Pemalsuan mata uang (US 100 miliar). Perdagangan ini diduga merupakan aktivitas yang penting bagi perkembangan militer Korea Utara dan juga terdapat indikasi bahwa Korea Utara kemungkinan melakukan pemalsuan asuransi sebagai kebijakan dalam negeri (Perl dan Nanto, 2007, p.1).

Produksi dan perdagangan obat terlarang ini telah dilakukan sejak tahun 1970-an dan telah diseludupkan kurang lebih ke 20 negara. Hal ini menjadi permasalahan bagi Jepang adalah karena Jepang merupakan pasar terbesar bagi aktivitas kriminal tersebut, sekitar 50% dari obat-obatan tersebut diseludupkan ke Jepang. Penyeludupan ini dilakukan Korea Utara bekerjasama dengan *yakuza* Jepang (kelompok kriminal atau *gangsters*), Mafia Rusia dan organisasi kriminal Internasional lainnya di Eropa maupun di Asia Tenggara (Kim Young, 2003, para.3). Perdagangan ini dilakukan Korea Utara dengan warga Korea Utara yang menetap di Jepang (*Chosen Soren*).

Pada tahun 1997, Bea Cukai Jepang menangkap 154 pon *Methamphetamines* yang berasal dari kapal Korea Utara (*Japan and North*, 2005, p.8). Pada bulan April 1997, di Pelabuhan Hosojima di kota Hyuga Provinsi Miyazaki, ditemukan 58 kilogram stimulan yang disembunyikan dalam tas plastik yang bernilai ¥8,5 milyar. Pada bulan Agustus 1998, ditangkap sindikat penyeludupan yang merupakan warga negara Jepang. Mereka membawa 300 kilogram stimulan dari sebuah kapal Korea Utara yang menyamar sebagai kapal penangkap ikan di laut Cina (Masashi, 2003, p.43). Pada bulan Januari 1999, ditangkap sebuah kapal Korea Utara yang kelebihan beban yang menyamar sebagai kapal penangkap ikan yang membawa 440 pon obat-obat tiruan. Bulan Mei 1999, penyeludupan obat-obatan seberat 100 kilogram yang ditujukan ke Jepang melalui Korea Selatan (*Japan and North*, 2005, p.8).

Selain itu, terdapat kasus-kasus lainnya. Yaitu, 100 kilogram disita pada bulan April 1999 di Pelabuhan Sakai Provinsi Tottori; 564 kilogram pada bulan

Oktober 1999 di Pantai Kurose, Provinsi Kagoshima; 249 kilogram pada bulan Februari 2000 di Pelabuhan Yunotsu, Provinsi Shimane dan 151 kilogram pada bulan Januari 2002 di Pantai Laut Genkai, Provinsi Fukuoka. Berdasarkan keterangan dari pemerintah, bahwa setiap tahunnya 10 ton stimulan di “konsumsi” di Jepang. Kepolisian Jepang menyatakan bahwa 34.6% stimulan yang disita sejak tahun 1998 hingga 2002 adalah berasal dari Korea Utara. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi Korea Utara, karena dengan perdagangan ini negaranya mendapatkan keuntungan kurang lebih ¥5 miliar pertahunnya dari Jepang (Masashi, 2003, p.43).

Aktivitas kriminal ini diperkirakan menghasilkan keuntungan US\$500 juta hingga US\$1 miliar pertahun bagi Korea Utara. *The Korea institute for defense analysis* melaporkan bahwa Korea Utara mendapatkan US\$700 juta hingga US\$1 miliar pertahun dari ekspor senjata, obat terlarang dan uang palsu. Pada tahun 2003, *U.S Forces Korea* melaporkan bahwa Korea Utara mendapatkan pajak dari ekspor obat ilegal sekitar US\$500 juta dan dari pemalsuan uang sekitar US\$15 - US\$20 juta. *U.S Forces Korea* juga melaporkan pada tahun 2001, Korea Utara melakukan ekspor rudal balistik ke wilayah Timur Tengah sebesar US\$580 juta. Antara tahun 2004-2005 diperkirakan Korea Utara memiliki defisit perdagangan sebesar US\$1.8 miliar. Di tahun 2005, ekspor sebesar US\$1.7 miliar dan impor US\$3.6 miliar (Masashi, 2003, p.43).

2.4.4 Kapal Mata-Mata Korea Utara

Permasalahan kapal mata-mata Korea Utara ini menjadi permasalahan yang menyangkut keamanan dalam negeri Jepang. Permasalahan ini juga tertuang dalam Deklarasi Pyongyang yang menyatakan bahwa permasalahan keamanan merupakan salah satu hal utama dalam menyelesaikan masalah ini.

Pada bulan Maret 1999, diduga dua kapal mata-mata Korea Utara menyamar sebagai kapal nelayan Jepang di sekitar Semenanjung Noto. Namun, kapal tersebut menghilang setelah dilakukan pengejaran oleh kapal patroli Jepang dan patroli kapal selam P-3C. Kemudian, pada Desember 2001, penjaga pantai Jepang menyatakan melihat kapal mata-mata Korea Utara di perairan barat laut

Amami Oshima, Provinsi Kagoshima. Kemudian penjaga pantai ini mengejarnya dengan kapal patroli namun kapal tersebut tidak mau berhenti. Peringatan dengan menembaki api kearah kapal tersebut, tidak dapat menghentikan kapal mata-mata ini. Kemudian, penyeludup tersebut meledakkan kapalnya sehingga menenggelamkan kapal dan orang-orang didalamnya (Hirotaka, 2007, p.9-10).

Kapal ini selain digunakan untuk melakukan mata-mata, diduga juga merupakan transportasi untuk melakukan aktivitas kriminal Korea Utara. Aktivitas kriminal ini dilakukan melalui *Chosen Soren*, yaitu warga negara Korea Utara yang berada di Jepang. Diperkirakan terdapat 200.000 warga Korea Utara yang tinggal menetap di Jepang (Manyin, 2003, p.14).

2.4.5 Diskriminasi Warga Negara Korea Utara

Banyak warga negara Korea Utara beremigrasi ke Jepang antara tahun 1910-1945 (masa perang dunia II). Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa yang dikirim untuk pertukaran pelajar (Fukuoka, 2000, p.3). Pada tahun 1945, diperkirakan warga negara Korea yang berada di Jepang sekitar 2,3 juta orang. Kebanyakan mereka memilih untuk dikembalikan ke Korea Selatan segera setelah perang berakhir atau kembali ke Korea Utara setelah tahun 1959. Kemudian selebihnya diberikan status warga negara khusus. Kemudian mereka harus memilih antara menjadi warga negara Jepang atau sebagai penduduk tetap di Jepang tetapi dengan kewarganegaraan Korea (*Japan and North*, 2005, p.14).

Meskipun pemerintah menyatakan tidak ada masalah dengan kelompok “minoritas” Korea ini, tetapi dalam kenyataannya terdapat perlakuan diskriminasi (Fukuoka, 2000, p.xxvii). Apabila warga negara Korea tersebut mengajukan untuk menjadi warga negara Jepang untuk menghindari diskriminasi, mereka harus menyembunyikan identitas mereka sebagai etnik Korea. Bae Chol-Eun dari *Mindan (The Anti-Communist Association of Koreans in Japan)* menyatakan “Jepang berfikir bahwa hanya warga negara Jepang saja yang dapat hidup di Jepang, tetapi orang yang dengan etnik keturunan Korea harus menutupi identitas etniknya. Masyarakat Jepang menentang kesetaraan ras dan menyatakan bahwa mereka berbeda” (*Japan and North*, 2005, p.15). Hingga kini

permasalahan etnik Korea ini masih menjadi permasalahan antara Jepang, Korea Utara dan Korea Selatan.



3. PENCULIKAN WARGA NEGARA JEPANG OLEH KOREA UTARA

3.1 Latar Belakang Penyelidikan

Kasus penculikan menjadi permasalahan yang serius di dalam negeri Jepang. Kasus yang hingga kini belum selesai secara keseluruhan, membuat normalisasi hubungan antara Jepang dan Korea Utara pun menjadi terhambat. Masalah penculikan ini pun menjadi agenda utama Jepang di dalam setiap pertemuan bilateral dengan Korea Utara dan juga di dalam pertemuan Internasional yang melibatkan kedua negara.

Indikasi yang melibatkan Korea Utara dalam kasus penculikan ini pertama kali terdapat dalam sebuah artikel dalam *Sankei Shinbun* pada 7 Januari 1980, yang mendiskusikan mengenai kasus hilangnya tiga pasangan pada tahun 1978 (*Japan and North*, 2005, p.9). Dalam artikel tersebut terdapat komentar dari pasangan lain yang pada saat kejadian juga diserang oleh orang tidak dikenal, yang setelah itu diketahui sebagai penculik. Namun pasangan ini berhasil melarikan diri. Mereka menceritakan bahwa pelaku penculikan berbicara dalam aksen Jepang, membawa senjata dan barang lainnya yang tidak diizinkan untuk digunakan di Jepang. Mereka tinggal di daerah sekitar pantai yang minim cahaya dengan menggunakan radio transmisi gelombang pendek. Berdasarkan keterangan ini, artikel tersebut berspekulasi bahwa penculikan tersebut dilakukan oleh agen asing.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan seorang agen mata-mata Korea Utara Kim Hyon Hui (menyamar sebagai Mayumi Hachiya) yang ditangkap setelah ia meledakkan sebuah pesawat KAL 858 milik Korea Selatan yang meledak di atas Laut Andaman (Myanmar) pada tanggal 29 November 1987 yang menewaskan 115 penumpang. Pesawat tersebut terbang dari Baghdad menuju Seoul. Kim Hyon Hui mengakui bahwa ia diperintah oleh Kim Il Sung untuk memalsukan paspor Jepang, berpenampilan dan bertingkah laku layaknya warga negara Jepang sehingga ia dapat dengan mudah masuk ke pesawat tanpa dicurigai

untuk meletakkan bom tersebut. Kim Hyon Hui mengatakan bahwa untuk melakukan penyamaran, ia diajarkan oleh seorang wanita Jepang yang telah diculik oleh Korea Utara (“Foreign Policy”, 1992, p.41).

Kasus ini kembali diperkuat oleh kesaksian agen mata-mata Korea Utara yang tertangkap di Korea Selatan karena melakukan penyusupan pada tahun 1993. Ia memberikan keterangan bahwa Korea Utara memang telah melakukan penculikan warga negara Jepang pada tahun 1970-an hingga tahun 1980-an. Ia mengatakan korban penculikan tersebut dibawa kepada Akademi Militer Rahasia Korea Utara untuk mengajarkan bahasa dan kebudayaan Jepang. Namun Jepang meyakini bahwa motif dari penculikan ini lebih dari sekedar untuk mengajarkan bahasa dan kebudayaan saja. Sebab Korea Utara telah memiliki petutur bahasa Jepang yang cukup banyak (*Japan and North*, 2005, p.9).

Pada tahun 1985, seorang agen rahasia Korea Utara ditangkap oleh pemerintah Jepang karena menggunakan paspor palsu dengan nama seorang warga negara Jepang yang diperkirakan telah hilang sekitar tahun 1980 (Hajime, 2003, p.44). Kasus ini menambah kecurigaan Jepang bahwa selain untuk mengajarkan bahasa dan kebudayaan Jepang, identitas para korban tersebut juga dimanfaatkan untuk melakukan mata-mata ke negara lain. Kasus ini diperkirakan adalah kasus penculikan Tadaaki Hara yang menghilang sejak tahun 1980. Cerita mengenai Kasus penculikan ini menjadi topik pada Harian Kompas Tanggal 1 Oktober 2002:

“Suatu malam di bulan Juni 1980, Radio Pyongyang memberitakan secara acak lima angka yang bagi orang biasa tidak dapat dimengerti, 29627. Kode nomor itu ternyata pesan berkode kepada agen mata-mata Korea Utara di Jepang.

Angka yang disebarluaskan itu ternyata tanggal lahir seorang agen mata-mata Korea Utara, Sin Guang Su, yang lahir pada tanggal 27 Juni 1929, sebuah kode eksekusi untuk menculik warga negara Jepang.

[...] Sin diperintahkan agar menculik warga Jepang yang mirip dengan usianya. Lalu mencuri identitasnya dan mengganti identitas itu, seolah Sin yang tercantum pada identitas tersebut. Dengan identitas sebagai warga negara Jepang, Sin dengan bebas bisa berpergian ke Korea Selatan dan beroperasi di Jepang. Itulah rencana besarnya.

Sin akhirnya berhasil menemukan orang Jepang yang diinginkan. Seorang warga Jepang yang lahir di Korut, mengoperasikan restoran Cina di Osaka, berusia mirip dengan Sin sekitar 40 tahun saat itu, diketahui bernama Tadaaki Hara. Orangtua Hara setelah diusut saat itu telah meninggal. Tidak beristri dan tidak memiliki anak. Hara tak pernah keluar negeri dan tak punya catatan kriminal apa pun. Sebuah target yang sangat sempurna bagi Sin.

[....] Sin berkenalan dan mengajaknya makan di sebuah restoran [....] kemudian menawarkan sebuah pekerjaan kepada Hara [....] menurut cerita karangan Sin, Presiden Direktur perusahaan dagang itu memiliki sebuah pondok di Kyushu dan membawa Hara ke daerah sana.

[....] Hara yang hidup-hidup dibawa ke Korut tanpa disadarinya, tertipu mulut manis Sin. Untuk menyempurnakan dirinya supaya benar-benar mirip Hara, Sin mengambil kursus belajar masak karena Hara pintar memasak.

Setelah pandai dan menyerupai segala kemampuan Hara, Sin kembali ke Jepang dan berusaha mengambil Surat Ijin Mengemudi mobil di Jepang. Dengan paspor beridentifikasi sama seperti Hara, Sin berangkat ke luar negeri. Ternyata berhasil tanpa hambatan apa pun. Sin ke Prancis, Swiss, Thailand, dan Korsel [....].

Meskipun kasus penculikan ini telah terungkap sejak tahun 1980, dimana bukti-bukti mengenai kasus ini telah terlihat, namun pengungkapannya sangat lambat. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya hubungan resmi diantara kedua negara sehingga pencarian informasi dan pengadaan penyidikan sulit untuk dilakukan. Masalah penculikan ini akhirnya “pecah” dalam masyarakat Jepang pada tahun 1997, setelah Myong Jin, seorang intelijen Korea Utara yang melarikan diri ke Korea Selatan dan kemudian bertemu dengan Isitaka Kenji seorang produser dari Periklanan Asahi. Myong Jin menceritakan bahwa ia mengetahui mengenai penculikan warga negara Jepang tersebut. Sesuai dengan cerita yang diungkapkan oleh Myong Jin, pada bulan Oktober 1996, Isitaka menerbitkan sebuah artikel *Modern Korea*. Dalam artikel tersebut ia menceritakan mengenai seorang wanita Jepang yang diculik pada saat usia remaja. Berdasarkan deskripsi dari artikel tersebut, orang tua dari Megumi Yokota yakin bahwa wanita yang dimaksud adalah anaknya yang hilang di Niigata pada tahun 1977 pada usia 13 tahun (*Japan and North*, 2005, p.10). Hingga kini kasus Megumi Yokota mendapatkan perhatian yang lebih di dalam masyarakat Jepang.

Kasus penculikan merupakan permasalahan kemanusiaan, dimana masalah kemanusiaan merupakan hal yang penting di Jepang. Oleh karena itu, dengan munculnya bukti-bukti tersebut, pada tahun 1997 untuk pertama kalinya Perdana Menteri Hashimoto Ryutaro meminta kepada kepolisian Jepang untuk mulai mengungkap kasus penculikan ini (Niksich, 2002, p.8).

3.2 Pengungkapan Kasus Penculikan

Pembicaraan mengenai usaha menormalkan kembali hubungan Jepang dan Korea Utara telah dimulai sejak tahun 1990. Namun, pembicaraan mengenai kasus penculikan ini mulai diangkat pada tahun 1991 disaat pertemuan putaran ketiga pembicaraan normalisasi hubungan Jepang dan Korea Utara (“Foreign Policy”, 1992, p.41). Pada saat itu, Jepang meminta keterangan kepada Korea Utara mengenai kasus peledakan Pesawat KAL 858. Hal ini menjadi permasalahan bagi Jepang adalah karena berdasarkan keterangan dari Kim Hyon Hui, Kepolisian Jepang kuat menduga bahwa Lee Un Hae adalah sebuah nama samaran yang digunakan oleh Korea Utara. Kepolisian Jepang menduga bahwa Lee Un Hae adalah Yaeko Taguchi yang menghilang pada tahun 1978 (Diplomatic Blue Book 1991, 1991, p.216). Namun, Korea Utara membantah keras mengenai pengakuan Kim Hyon Hui tersebut, dan menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin kasus penculikan ini diangkat pada pertemuan-pertemuan berikutnya (Diplomatic Blue Book 1992, 1992, p.177). Peledakan pesawat ini mengakibatkan Korea Utara di tetapkan sebagai teroris oleh Amerika Serikat (Lee dan Choi, 2007, p.7).

Pada tahun 1997, ketika kasus Megumi Yokota terungkap, kasus penculikan ini semakin berkembang di Parlemen dan Media Masa, sehingga kasus ini pun mendapatkan perhatian luas di dalam masyarakat. Semakin berkembangnya kasus ini, membuat pemerintah Jepang semakin serius lagi untuk mengungkapkan kasus tersebut. Oleh karena itu, Jepang meminta kepada pemerintah Korea Utara untuk memberikan keterangan mengenai korban dan pemerintah Jepang juga meminta agar pemerintah Korea Utara menangani kasus ini dengan serius. Namun, seperti sikap sebelumnya, Korea Utara menyatakan

bahwa hal ini bukanlah tanggung jawab pihaknya karena Jepang tidak memiliki bukti yang nyata.

Hingga pada tahun-tahun berikutnya, kasus ini masih tetap belum ada kejelasan dari Korea Utara. Permasalahan ini menjadi semakin sulit untuk diatasi, apalagi ketika Korea Utara meluncurkan percobaan rudalnya pada bulan Agustus 1998, hubungan kedua negara menjadi semakin dingin. Menyangkut dengan percobaan peluncuran rudal tersebut, pada bulan Desember 1999, untuk pertama kalinya Perdana Menteri Tomiichi Murayama mengunjungi Korea Utara dengan tujuan untuk memfasilitasi negosiasi antar pemerintah melalui pembicaraan diantara kelompok politik. Pada kesempatan itu, Jepang menyatakan sangat terganggu mengenai peluncuran rudal tersebut dan pada saat itu juga Perdana Menteri Murayama juga menyatakan bahwa Jepang akan mengambil tindakan pencabutan kebijakan mengenai bantuan pangan⁸ dan bantuan lainnya. Hal ini disebabkan karena Jepang merasa peluncuran rudal tersebut dapat menyebabkan keresahan dan dapat mengganggu keamanan wilayah Jepang. Ancaman Jepang tersebut ditanggapi Korea Utara dengan menyatakan akan mencoba untuk melakukan investigasi terhadap korban penculikan dan meminta Jepang agar meninjau kembali mengenai bantuan pangan tersebut. Namun, hingga putaran ke 11 disaat pertemuan normalisasi hubungan kedua negara pada bulan Oktober 2000, Korea Utara belum juga memenuhi janjinya untuk memberikan informasi mengenai kasus penculikan ini.

Pada bulan Maret 2002, Palang Merah Korea Utara (*North Korean Red Cross*) menyatakan akan memulai kembali investigasi terhadap nasib dan keberadaan dari korban penculikan. Oleh sebab itu, pada tanggal 29-30 April 2002, diadakanlah pertemuan antara Palang Merah Jepang-Korea Utara untuk membahas kasus tersebut. Pada 30 Juli, Menteri Luar Negeri kedua negara bertemu pada saat pertemuan *ARF Ministerial Meeting* ke 9 di Brunai Darusalam dan berdasarkan kesepakatan pada pertemuan tersebut, Palang Merah Jepang-Korea Utara mengadakan pertemuan pada 18-19 Agustus 2002 dan pertemuan perundingan tingkat pemimpin tinggi Jepang-Korea Utara pada 25-26 Agustus

⁸ Bantuan tersebut dalam bentuk pangan dan obat-obatan. Pada tahun 2000, Jepang memberikan bantuan pangan rutin sebesar 500.000 ton beras kepada Korea Utara melalui *World Food Programme* (WFP).

2002. Pada pertemuan diantara tingkat pemimpin tinggi, kedua belah pihak mengakui bahwa penting untuk memperbaiki hubungan kedua negara dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Berdasarkan pertemuan ini, maka disepakatilah bahwa pemimpin kedua negara akan bertemu pada pertemuan puncak pada bulan September 2002 (Diplomatic Blue Book 2003, 2003, p.15-16).

Pertemuan tersebut diadakan pada tanggal 17 September 2002 di Pyongyang, Korea Utara. Pada pertemuan puncak antara Perdana Menteri Junichiro Koizumi dan Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara Kim Jong Il ini, terjadi kesepakatan perbaikan hubungan antara Jepang dan Korea Utara yang tertuang dalam sebuah deklarasi, yaitu Deklarasi Pyongyang. Pada saat itu secara tidak terduga, untuk pertama kalinya Kim Jong Il menyatakan bahwa agen rahasianya memang telah menculik warga negara Jepang pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Pengakuan Kim Jong Il tersebut disambut protes keras oleh Perdana Menteri Koizumi. Namun, Kim Jong Il meminta maaf dan menyatakan bahwa hal ini tidak akan terjadi lagi dan pihaknya bersedia untuk membicarakan hal ini (Diplomatic Blue Book 2003, 2003, p. 15).

Terungkapnya kasus penculikan ini tidak lepas dari peranan Shinzo Abe yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Jepang. Saat itu, Abe mengatakan secara tegas agar Perdana Menteri Koizumi tidak menandatangani Deklarasi Pyongyang apabila pihak Korea Utara tidak mau mengakui telah melakukan penculikan dan tidak mau memberikan keterangan mengenai permasalahan ini ("The Abduction Issue", 2008, para.6).

Secara resmi pemerintah Korea Utara mengakui telah menculik 13 orang warga Jepang, yaitu, Yutaka Kume, Megumi Yokota, Yaeko Taguchi, Yasushi Chimura, Fukie Hamamoto, Kaoru Hasuike, Yukiko Okudo, Shuichi Ichikawa, Rumiko Matsumoto, Toru Ishioka, Kaoru Matsuki Tadaaki Hara dan Keiko Arimoto. Menurut informasi yang diberikan oleh pemerintah Korea Utara, bahwa 10 orang korban diculik di beberapa tempat di Jepang dengan beberapa kasus dan 3 orang diculik ketika sedang mengunjungi Eropa (Diplomatic Blue Book 2003, 2003, p.16). Dari 13 korban hanya 4 orang yang dikabarkan masih hidup, sedangkan 9 orang lainnya telah meninggal.

Kim Jong Il mengakui bahwa tujuan utama penculikan ini adalah agar para korban penculikan dapat mengajarkan bahasa dan kebudayaan Jepang kepada agen-agen rahasia Korea Utara sementara identitas mereka yang diculik digunakan untuk melakukan penyusupan ke negara lain. Hal ini sama seperti dugaan Jepang.

Pada pertemuan tersebut, pembicara dari Kementerian Luar Negeri Korea Utara menekankan bahwa pihaknya akan memberikan waktu kepada keluarga dan relasi dari korban yang selamat untuk bertemu dengan para korban, dan jika diinginkan Korea Utara akan membuka kesempatan bagi para partai pemerintah Jepang yang relevan untuk bertemu dan membicarakan pengembalian sementara para korban penculikan jika para korban tersebut menginginkannya (Diplomatic Blue Book 2003, 2003, p. 18).

Untuk memperjelas permasalahan ini, Jepang mengirimkan tim pencari fakta ke Pyongyang untuk mengumpulkan informasi pada tanggal 28 September hingga 1 Oktober 2002. Tim pencari fakta ini bertemu dengan para korban penculikan yang masih hidup dan berusaha mengumpulkan informasi mengenai korban lainnya yang tidak diakui oleh pemerintah Korea Utara. Dari hasil investigasi tersebut, di temukan lima orang korban yang masih hidup (Korea Utara menyatakan empat orang). Tetapi informasi spesifik mengenai korban yang dinyatakan telah meninggal sulit didapat. Oleh karena itu, Jepang terus mendesak Korea Utara untuk menyatakan fakta yang sebenarnya mengenai penyebab kematian para korban (*Abductions of*, 2006, p.3). Satu orang korban yang ditemukan masih hidup adalah Hitomi Soga. Selain itu Jepang menemukan satu orang korban lainnya yaitu Miyoshi Soga (Ibu dari Hitomi Soga) (*About NARKN*, 2006, *para.3*). Sehingga korban penculikan berjumlah 15 orang. Pemerintah Korea Utara menyatakan bahwa Hitomi Soga masih hidup, sedangkan ibunya tidak diketahui keberadaannya.

Sesuai dengan perjanjian antara kedua negara, pada tanggal 15 Oktober 2002, lima orang korban yang dinyatakan masih hidup dipulangkan ke Jepang untuk bertemu dengan keluarga mereka di Jepang selama 2 minggu. Korban tersebut adalah Hitomi Soga, Yasushi Chimura, Fukie Hamamoto, Kaoru Hasuike dan Yukiko Okuda. Usaha pengembalian korban ini dilakukan dengan negosiasi

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Para korban ini dipulangkan ke Jepang tanpa boleh membawa keluarga mereka yang berada di Korea Utara. Ini dikarenakan pemerintah Korea Utara tidak mengizinkan anak yang lahir di negaranya untuk keluar dari Korea Utara. Pemerintah Jepang menekankan kepada pemerintah Korea Utara untuk memberikan keamanan kepada keluarga korban yang masih berada di Korea Utara dan juga mendesak pemerintah Korea Utara untuk segera mengembalikan keluarga para korban tersebut.

Namun, hingga waktu yang telah disepakati, Jepang tidak mengembalikan para korban sesuai dengan perjanjian. Hal ini membuat pemerintah Korea Utara marah dan mengatakan bahwa Jepang tidak menepati janjinya. Keputusan ini dilakukan oleh Jepang adalah berdasarkan pertimbangan dan permintaan dari korban sendiri dan keluarga korban. Para korban tersebut menyatakan tidak ingin kembali ke Korea Utara karena hidup di Korea Utara sangat tertekan (Diplomatic Blue Book 2003, 2003, p.18).

Kasus penculikan ini diangkat oleh pemerintah Jepang pada pertemuan *Six Party Talks* pada tanggal 27-29 Agustus 2003. Jepang menjelaskan bahwa kasus penculikan ini harus diselesaikan dahulu sebelum menormalkan hubungan kedua negara dan penyelesaian kasus ini merupakan solusi bagi penyelesaian kasus lainnya. Pada pertemuan tersebut Jepang juga menekankan agar Korea Utara mengembalikan seluruh keluarga korban penculikan yang masih berada di Korea Utara dan memberikan seluruh informasi mengenai keberadaan seluruh korban. Namun Korea Utara menanggapi bahwa sebelum melakukan apa yang diinginkan oleh Jepang, seharusnya Jepang menepati janjinya terlebih dahulu untuk mengembalikan seluruh korban penculikan yang dijanjikan hanya berkunjung dua minggu. Tanggal 4-5 Mei 2004, kedua pemerintah bertemu di Beijing untuk kembali membicarakan permasalahan ini. Pada kesempatan tersebut, Jepang menekankan agar Korea Utara mengembalikan keluarga korban penculikan yang masih berada di Jepang dan berjanji akan memberikan bantuan ekonomi kepada Korea Utara (*Japan-North Korea*, 2004, para.18-25).

Berdasarkan pernyataan Jepang tersebut, pada bulan yang sama, Perdana Menteri Koizumi kembali mengunjungi Pyongyang untuk kedua kalinya. Hasil dari pertemuan ini adalah pemerintah Korea Utara menyetujui dikembalikannya

delapan orang dari keluarga kelima korban penculikan yang telah dikembalikan sebelumnya ke Jepang. Delapan orang tersebut adalah:

a) Keluarga Yasushi Chimura dan Fukie Hamamoto:

- O Kyong Ae (Anak Perempuan, 22 Tahun)
- O Kyong Sok (Anak Laki-laki, 20 Tahun)
- O Kyong Ho (Anak Laki-laki, 16 Tahun)

b) Keluarga Kaoru Hasuike dan Yukiko Okuda:

- Yon Hwa / Shigeyo (Anak Perempuan, 22 Tahun)
- Ki Hyok / Katsuya (Anak Laki-laki, 19 Tahun)

c) Keluarga Hitomi Soga:

- Charles Robert Jenkins (Suami, 62 Tahun)
- Roberta Mika Jenkins (Anak Perempuan, 21 Tahun)
- Brinda Carol Jenkins (Anak Perempuan, 18 Tahun)

Dari delapan orang tersebut, hanya keluarga Kaoru Hasuike dan Yasushi Chimura yang dikembalikan ke Jepang. Rombongan ini dibawa ke Jepang pada tanggal 22 Mei 2004 bersama dengan pulang Perdana Menteri Koizumi. Suami dan dua orang anak Hitomi Soga tidak ikut dipulangkan ke Jepang, dikarenakan suami Hitomi Soga takut jika ia keluar dari Korea Utara dan datang mengunjungi Jepang, maka ia akan ditangkap oleh militer Amerika Serikat karena ia termasuk dalam daftar orang yang dicari oleh militer Amerika Serikat. Ini dikarenakan keterlibatannya dalam desersi pada tahun 1965. Pertemuan keluarga ini direncanakan akan diadakan di negara ketiga.

Setelah dilakukan negosiasi, pada akhirnya “reuni” keluarga Hitomi Soga disepakati akan diadakan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2004. Jakarta dipilih sebagai tempat pertemuan karena Indonesia tidak memiliki perjanjian Ekstradisi⁹ dengan Amerika Serikat. Setelah kurang lebih sepuluh hari berada di Jakarta, Jenkins memutuskan untuk memberanikan diri mengunjungi Jepang. Sehingga pada tanggal 18 Juli 2004, Hitomi Soga dan keluarganya berangkat mengunjungi

⁹ Perjanjian Ekstradisi adalah penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara kepada negara lain yang diatur dalam perjanjian antara negara yang bersangkutan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, p.291).

Jepang. Pemerintah Jepang telah berusaha meminta kepada Amerika Serikat agar meringankan hukuman bagi Jenkins karena saat ini ia sedang mengalami gangguan kesehatan yang serius (terkena penyakit kanker) dan meminta untuk tidak menangkap Jenkins bila ia datang mengunjungi Jepang. Namun pemerintah Amerika Serikat menolak permohonan Jepang tersebut. Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya mempunyai hak untuk menangkap dan menghukum Jenkins.

Namun, Jenkins yang dituduh membelot dan menetap selama lebih dari empat dasawarsa di Korea Utara mengatakan setibanya di Jepang, ia akan melapor dengan sukarela ke sebuah pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang untuk menghadapi dakwaan. Dalam wawancara pertama setelah meninggalkan Korea Utara, Jenkins mengatakan ia menyerahkan diri dalam upaya mempersatukan putri-putrinya dengan ibu mereka, dan juga untuk membersihkan hati nuraninya. Jenkins mengatakan ia pernah berusaha lolos dari Korea Utara dan minta suaka ke Kedutaan Rusia pada tahun 1966 (“Charles Jenkins”, 2004, para.1).

Penyerahan diri Jenkins, mengakibatkan ia diberhentikan secara tidak hormat oleh Angkatan Darat Amerika Serikat karena membelot saat bertugas di perbatasan Korea Utara pada tahun 1965. Dalam sidang yang berlangsung di Pangkalan Militer Amerika Serikat di Jepang, Jenkins mengaku menyerahkan diri ke pihak lawan (Korea Utara) karena ia takut akan ditugaskan ke Vietnam yang pada saat itu juga sedang berperang. Selama di Korea Utara, Jenkins mengajarkan bahasa Inggris kepada para agen rahasia Korea Utara dan menurut pengakuannya, selama berada di Korea Utara ia tidak mendapatkan perlakuan yang layak (*Amerika Pecat*, 2004, para.7).

Selain itu, Hakim Mahkamah Militer Amerika Serikat memutuskan hukuman kurungan selama 30 hari kepada Jenkins, menurunkan pangkatnya dari Sersan menjadi Prajurit, dan menghapus hak Jenkins untuk menerima gaji dan fasilitas lainnya yang berhak diterima oleh para veteran. Namun, hukuman tersebut terbilang ringan bagi Desertir¹⁰ (*Amerika Pecat*, 2004, para.2).

Setelah menjalani hukuman, pada tanggal 27 November 2004 Jenkins dibebaskan. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2004 Jenkins dan keluarganya

¹⁰ Orang yang melakukan desersi (Lari meninggalkan dinas ketentaraan atau membelot kepada musuh) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, p.257).

memutuskan untuk tinggal menetap di Sado, Jepang (Diplomatic Blue Book 2005, 2005, p.24).

Sementara itu, korban penculikan yang dinyatakan telah meninggal masih belum diketahui kebenaran keberadaannya, apakah memang telah meninggal atau hal ini hanyalah karangan dari Korea Utara saja, dan permasalahan ini kembali menjadi isu utama bagi kedua negara. Kim Jong Il berjanji untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan ini pada saat pertemuan selanjutnya. Namun pada pertemuan di bulan Agustus dan September 2004 (Lanjutan pertemuan bulan Mei), ketika kedua negara bertemu kembali, para petinggi Korea Utara tidak memenuhi janjinya untuk memberikan data yang pasti mengenai korban-korban tersebut. Tetapi Korea Utara memberikan informasi bahwa ada dua orang korban lagi yang dinyatakan memasuki Korea Utara tetapi keberadaannya masih belum di ketahui.

Pada pertemuan ketiga di bulan November 2004, delegasi Jepang mengunjungi Pyongyang untuk langsung mewawancarai pejabat Korea Utara yaitu “Komite Investigasi” yang bertanggung jawab bagi investigasi ulang sepuluh korban penculikan yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Delegasi ini juga menemui “saksi” dalam upaya untuk membuka kebenaran informasi mengenai korban yang masih belum diketahui. Bagaimanapun, tidak ada perubahan dari pejabat Korea Utara mengenai data korban penculikan ini. Pemerintah Korea Utara menetapkan bahwa delapan dari sepuluh orang korban dikatakan telah meninggal dunia, sedangkan dua orang lainnya yang memasuki Korea Utara masih belum ada kepastian. Pada tahun 2005 dan 2006, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, bahwa terdapat korban lainnya yang telah diculik oleh Korea Utara, yaitu Minoru Tanaka dan Kyoko Matsumoto. Sehingga korban penculikan berjumlah 17 orang. Namun, Korea Utara menyatakan tidak pernah melakukan penculikan terhadap dua korban tersebut, dan juga mengatakan bahwa kedua korban tidak pernah memasuki Korea Utara.

Sebagai reaksi dari protes Jepang, pada tahun 2004, Korea Utara memberikan informasi dan bukti berupa tulang Megumi Yokota kepada Jepang. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, DNA yang ditemukan pada fragmen

tulang tersebut bukanlah DNA Megumi Yokota. Ini kembali membawa permasalahan dalam hubungan kedua negara. Selain itu, pemerintah Jepang menyatakan bahwa fakta yang diberikan oleh pemerintah Korea Utara tidak mempunyai dasar objektif mengenai korban yang meninggal.

Terbukanya kasus penculikan warga negara Jepang ini menyebabkan munculnya fakta-fakta baru yang memperkuat posisi Jepang. Ternyata pada tahun 1970-an hingga tahun 1980-an, Korea Utara tidak hanya menculik warga negara Jepang saja, tetapi terdapat korban dari 11 negara lainnya yang diculik dengan beberapa kasus. Penyelidikan ini dilakukan oleh NARKN (*National Association for the Rescue of Japanese Kidnapped by North Korea/ Sukuukai*) dan AFVKN (*Association of the Families of Victims Kidnapped by North Korea/ Kazoku Kai*) yang diperoleh berdasarkan wawancara terhadap korban penculikan yang selamat (*North Korean Abduction*, 2006, para.1).

Selain itu, terdapat juga kasus penculikan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara pembajakan pesawat Japan Airlines 351 (JAL) yang terjadi pada bulan Desember 1969 (kasus ini disebut dengan kasus *yodo-go*). Setelah lepas landas, pesawat dibajak dan pilot dipaksa mendaratkan pesawat tersebut di Korea Utara. Kru pesawat, penumpang dan pesawat tersebut tidak pernah kembali (*Abductions of*, 2006, p.2). Pada bulan September 2002, kepolisian Jepang menyatakan pembenaran mengenai penahanan Kimihiro Uomoto sebagai tersangka pelaku kasus *yodo-go*, tetapi Korea Utara tidak mengakui keterlibatannya dalam kasus ini. Pembenaran kasus ini didapat berdasarkan pernyataan dari istri pelaku pembajakan dan terdapat bukti lainnya yang melibatkan penculikan warga negara Jepang di Eropa (*Diplomatic Blue Book* 2003, 2003, p.18).

3.3 Kontroversi DNA Megumi Yokota

Pada bulan November 2004, wakil dari Kementerian Luar Negeri Jepang kembali dari Korea Utara dengan membawa “Kremasi Jenazah” yang dinyatakan sebagai “Fragmen Tulang” Megumi Yokota. Penelitian terhadap lima fragmen tulang Megumi Yokota dilakukan di Institute Penelitian Nasional Kepolisian di

Tokyo dan Universitas Teikyo (*Reinvestigation Concerning*, 2004, p.3). Hasil dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa DNA yang ditemukan dalam fragmen tulang tersebut berbeda dengan DNA Megumi Yokota. Profesor Yoshii Tomio dari Universitas Teikyo menggunakan proses *Nest Polymerase chain Reaction* (PNR), yaitu dengan menjelaskan analisis DNA dua kali dari biasanya. Ia mengatakan bahwa ia memiliki ekstrak DNA dari dua sumber, yaitu DNA dari pemerintah Korea Utara dan DNA dari tali pusar Megumi yang didapat dari orang tua Megumi. Setelah melakukan penelitian, Yoshii menyatakan bahwa dua DNA yang ditelitinya adalah dua DNA dari orang yang berbeda (*Reinvestigation Concerning*, 2004, p.12). Kasus ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi, pada kasus sebelumnya Korea Utara juga pernah memberikan fragmen tulang yang dinyatakan sebagai Kaoru Matsuki. Namun setelah diteliti oleh pihak Jepang, fragmen tulang tersebut terlalu kurus dari yang semestinya dan DNA yang ditemukan berbeda dengan DNA Matsuki.

Menanggapi temuan tersebut, Jepang mengirimkan protes kepada Korea Utara melalui Kedutaan Korea Utara di Beijing. Namun, pihak Korea Utara menentang keras terhadap penelitian Jepang tersebut. Korea Utara menyatakan bahwa teknologi yang digunakan Jepang tersebut adalah tidak akurat. Pernyataan ini juga diperkuat oleh pernyataan Terry Melton seorang ahli DNA Amerika Serikat yang menyatakan bahwa dalam laboratorium, Amerika tidak menggunakan penelitian dengan cara PNR, ini dikarenakan penelitian PNR beresiko tinggi dapat terkontaminasi. Pernyataan ini menimbulkan reaksi di dalam masyarakat Jepang, dan menginginkan adanya pemeriksaan ulang di negara ketiga. Tetapi Kementerian Luar Negeri Jepang menolak dan menyatakan akan tetap menggunakan hasil tes tersebut dan mengatakan tidak mungkin untuk melakukan pemeriksaan ulang di negara ketiga (*Reinvestigation Concerning*, 2004, p.12).

Menurut keterangan dari Myong Jin, seorang inteligen Korea Utara yang melarikan diri, ia melihat Megumi Yokota pada tahun 1988 di sebuah *training school* untuk inteligen Korea Utara. Ia juga mengatakan bahwa Megumi mengalami gangguan kejiwaan (Niksch, 2002, p.8). Pemerintah Korea Utara menyatakan bahwa Megumi telah meninggal pada bulan April 1994, namun

menurut keterangan dari Fukie Chimura (seorang korban penculikan yang selamat), mengatakan bahwa pada bulan Juni 1994 Megumi pindah ke sebelah rumahnya. Namun, Megumi hanya tinggal beberapa bulan saja dan kemudian pindah. Sejak saat itu Fukie tidak mengetahui keberadaan Megumi. Namun, Fukie membenarkan bahwa Megumi mengalami masalah kejiwaan dan ia juga mengatakan bahwa Megumi selalu diawasi (dimonitor) oleh intelijen Korea Utara. Menurut keterangan dari mantan korban penculikan lainnya yaitu Kaoru Hasuike mengatakan bahwa Megumi telah berpisah dari suaminya sejak tahun 1993, dan ia juga pernah membantu Megumi berobat ke rumah sakit pada tahun 1993 (*Megumi Yokota Seen*, 2008, para.2-6).

Berbagai macam spekulasi muncul dalam masyarakat Jepang menyangkut kasus ini. Pertama, Megumi diperkirakan masih hidup namun Pyongyang tidak ingin melepaskannya karena ia mengetahui banyak mengenai mata-mata Korea Utara. Kedua, ada dugaan bahwa Megumi menderita gangguan psikologi akibat menjadi tawanan dan jika ia dibebaskan maka akan menimbulkan kemarahan masyarakat Jepang. Dan spekulasi ketiga, kemungkinan Megumi memang telah meninggal dunia, tetapi jenazahnya sebenarnya tidak diketahui keberadaannya.

Sulitnya mendapatkan informasi yang pasti mengenai kasus ini membawa hubungan Jepang dan Korea Utara menjadi semakin sulit. Bila pemerintah Korea Utara mau mengembalikan anak perempuan dari Megumi, yaitu Kim Hye-Gyong, mungkin permasalahan ini akan lebih jelas.¹¹ Menurut keterangan Myong Jin, Megumi telah berkali-kali mencoba untuk melarikan diri dari Korea Utara, tetapi selalu tertangkap dan dibawa kembali ke Korea Utara (Yamamoto dan Harden, 2007, para.13).

Megumi Yokota merupakan salah satu korban yang banyak mendapat simpatik dari masyarakat Jepang. Pada tahun 2006, dibuat film dokumenter yang menceritakan kisah penculikan Megumi. Film ini banyak mendapatkan penghargaan dari berbagai negara.¹²

¹¹ Megumi Yokota telah menikah dengan Kim Chol Jun, seorang pria warga negara Korea Selatan yang juga diperkirakan telah diculik oleh Korea Utara. Kim Chol Jun diculik pada tahun 1978 pada usia 16 tahun.

¹² Film ini dibuat dengan judul "*Abduction-The Megumi Yokota Story*"/ "*Abduction: An Unforgivable Crime*". Dibuat pada tahun 2006 dan dipasarkan dalam bentuk DVD pada bulan

3.4 Kasus dan Permasalahan Korban Penculikan

Pada bulan November 2004, Jepang dan Korea Utara kembali melakukan pertemuan perbaikan hubungan di Pyongyang pada tanggal 9-14 November. Pada kesempatan tersebut, Korea Utara memberikan hasil dari investigasi ulangnya terhadap korban-korban penculikan. Berikut adalah data korban penculikan yang dimiliki oleh pemerintah Jepang dan hasil dari investigasi ulang Korea Utara (urutan berdasarkan tahun penculikan). Usia yang tertulis adalah usia korban pada saat diculik.

1. Yutaka Kume (Pria, 52 Tahun)

- Diperkirakan diculik pada tanggal 19 September 1977 di Perairan Ushitsu Provinsi Ishikawa.
- Pihak Korea Utara menyatakan bahwa Yutaka Kume memang pernah memasuki Korea Utara. Tetapi investigasi Jepang yang menyatakan bahwa Yutaka dibiayai oleh Korea Utara untuk tinggal di Jepang dan bekerja sebagai asisten agen rahasia Korea Utara, dibantah oleh Korea Utara.
- Pada bulan Januari 2003, pemerintah Jepang mengidentifikasi bahwa penculikan Yutaka Kume dilakukan oleh Kim Se-Ho, seorang agen rahasia Korea Utara.

2. Megumi Yokota (Wanita, 13 Tahun)

- Diculik tanggal 15 November 1977, pada saat pulang sekolah di Kota Niigata.
- Megumi menikah (di Korea Utara) dengan seorang warga negara Korea Selatan, Kim Chol Jun dan memiliki seorang anak perempuan, Kim Hye Gyong. Anak perempuan Megumi ini juga merupakan salah satu keluarga korban yang dituntut pemerintah Jepang untuk ikut dipulangkan ke Jepang.

Maret 2007. Film ini dibuat oleh Amerika Serikat bekerjasama dengan Jepang. Ulasan film dokumenter ini dapat dilihat di www.abductionfilm.com.

Sumber: <www.greece_Japan.com/en/publish/article_192.shtml>.

- Pada saat pertemuan ketiga antara Jepang-Korea Utara, pada bulan November 2004, Korea Utara menyatakan bahwa Megumi meninggal pada bulan April 1994 dan menyerahkan “Jenazah” nya kepada pemerintah Jepang. Tetapi kemudian DNA yang ditemukan pada “Jenazah” tersebut adalah DNA orang yang berbeda. Jepang mencurigai bahwa Megumi meninggal secara tidak wajar.
 - Pihak Korea Utara memberikan bukti laporan kesehatan (*Medical Report*) Megumi. Namun pihak Jepang menganggap laporan tersebut tidak lengkap. Karena laporan tersebut hanya sampai pada 24 September 1993.
3. Minoru Tanaka (Pria, 28 Tahun)
- Menghilang setelah meninggalkan Jepang menuju Eropa pada bulan Juni 1978. Lokasi penculikan di Provinsi Hyogo.
 - Minoru Tanaka diidentifikasi oleh pemerintah Jepang sebagai korban penculikan pada 27 April 2005. Sejak saat itu, pemerintah Jepang meminta agar Korea Utara mengembalikan Tanaka dan memberikan seluruh informasi mengenai kasus ini, tetapi tidak ada respon dari Korea Utara.
 - Pemerintah Korea Utara menyangkal bahwa agennya telah menculik Minoru Tanaka. Dan menyatakan bahwa ia tidak pernah memasuki Korea Utara.
4. Yaeko Taguchi (Wanita, 22 Tahun)
- Diperkirakan menghilang sekitar bulan Juni 1978. Lokasi penculikan tidak diketahui.
 - Kim Hyon Hui, seorang agen rahasia Korea Utara yang menjadi tersangka pemboman Pesawat Korean Air Lines pada tahun 1987, menyatakan bahwa ia mempelajari bagaimana bersikap seperti orang Jepang dari seorang wanita bernama Lee Un-Hae. Lee Un-Hae ini diperkirakan adalah Yaeko Taguchi.

- Berdasarkan penjelasan dari Kim Hyon Hui, didapat bahwa gambaran dari Lee Un-Hae adalah mirip dengan Yaeko Taguchi.



Gambar 1.

Sumber: <http://www.rachi.go.jp/en/ratimondai/meta/betten2.pdf>

- Korea Utara menyangkal bahwa Lee Un-Hae adalah Yaeko Taguchi. Korea Utara menyatakan bahwa Lee Un-Hae tinggal bersama dengan Kim Hyon Hui (1981-1983), sedangkan Yaeko Taguchi tinggal bersama dengan Megumi Yokota. Namun Jepang mempunyai data bahwa Yaeko Taguchi tinggal bersama dengan Megumi Yokota pada tahun 1983 hingga tahun 1985. Penyangkalan Korea Utara tersebut dianggap tidak masuk akal oleh Jepang.
 - Korea Utara menyatakan bahwa Yaeko Taguchi menikah dengan Tadaaki Hara (Kasus no.11) pada 19 Oktober 1984. Tetapi data yang dimiliki Jepang bahwa Taguchi tinggal bersama dengan Megumi hingga tahun 1985. Pernyataan ini berlawanan dengan pernyataan Korea Utara.
 - Korea Utara menyatakan bahwa Yaeko Taguchi telah meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Namun tidak ada bukti yang diberikan oleh pemerintah Korea Utara. Korea Utara menyatakan bahwa Taguchi meninggal pada 30 Juli 1986, tetapi ada seorang saksi mata mengatakan bahwa beberapa bulan setelah tanggal 30 Juli tersebut ia melihat Taguchi di *Rakwon Department Store* di Pyongyang.
5. Yasushi Chimura (Pria, 23 Tahun) dan Fukie Hamamoto (Wanita, 23 Tahun)
- Diculik pada 7 Juli 1978 di Provinsi Fukui. Menghilang ketika sedang keluar bersama.

- Pasangan ini menikah pada tahun 1979 di Korea Utara. Pasangan ini termasuk pasangan yang dikembalikan ke Jepang oleh pemerintah Korea Utara pada tanggal 15 Oktober 2002. Pada 22 Mei 2004, tiga orang anaknya ikut di pulangkan ke Jepang.
- Pada Februari 2006 pemerintah Jepang mengidentifikasi bahwa pasangan ini diculik oleh Sin Kwang-Su, yaitu seorang agen rahasia Korea Utara.

6. Kaoru Hasuike (Pria, 20 Tahun) dan Yukiko Okudo (Wanita, 22 Tahun)

- Diperkirakan diculik di Provinsi Niigata.
- Diculik pada 31 Juli 1978. Menghilang ketika sedang keluar bersama.
- Pasangan ini menikah pada tahun 1980 di Korea Utara. Pasangan ini termasuk pasangan yang dikembalikan ke Jepang pada bulan Oktober 2002. Dua orang anak mereka di kembalikan ke Jepang pada 22 Mei 2004.
- Pada Februari 2006, pemerintah Jepang mengidentifikasi bahwa pasangan ini diculik oleh Hoi Sun Chol. Seorang agen rahasia Korea Utara.

7. Shuichi Ichikawa (Pria, 23 Tahun)

- Diculik ketika sedang berada di pantai pada tanggal 12 Agustus 1978, di Provinsi Kagoshima.
- Korea Utara menyatakan bahwa Ichikawa meninggal karena serangan jantung ketika berenang di laut. Pernyataan ini tidak masuk akal bagi pemerintah Jepang. Karena, menurut informasi yang didapat oleh pemerintah Jepang Ichikawa tidak dapat berenang.
- Menurut informasi dari Korea Utara, bahwa Ichikawa telah menikah dengan Rumiko Matsumoto pada 20 Juli 1979. Tetapi kebenarannya masih belum jelas.
- Ichikawa dikatakan telah meninggal akibat “gagal jantung” pada 4 September 1979 di “*Gangwon-do People’s Hospital*”. Tetapi Jepang

mempertanyakan mengapa Ichikawa tidak mendapatkan fasilitas yang layak dari rumah sakit.

Rumiko Matsumoto (Wanita, 24 Tahun)

- Diculik bersama dengan Shuichi Ichikawa pada tanggal 12 Agustus 1978, di Provinsi Kagoshima.
- Informasi yang diberikan oleh Korea Utara bahwa Ichikawa telah menikah dengan Rumiko Matsumoto pada 20 Juli 1979, tidak dapat diterima oleh Jepang. Karena Jepang memiliki data bahwa dari tahun 1978 hingga akhir Oktober 1979, Matsumoto tinggal bersama dengan wanita Jepang yang lainnya di “*guesthouse*” dan belum menikah.
- Korea Utara memberikan keterangan bahwa Matsumoto telah meninggal akibat “gagal jantung”. Kejadian ini dapat dikatakan “kematian mendadak”, karena usianya masih muda dan tidak ada catatan penyakit. Menurut dokter dari “*Hospital No.695*” memberikan kesaksian bahwa 6 bulan sebelum kejadian “fatal” tersebut, ia melihat Matsumoto bekerja di satu atau dua rumah sakit yang berbeda. Pada saat itu ia terlihat sangat sehat. Teman “*guesthouse*” Matsumoto juga menyatakan bahwa malam disaat Matsumoto dikatakan meninggal, Matsumoto makan seperti biasanya dan tidak ada tanda-tanda sakit.
- Menurut dokter di “*Hospital no.695*”, empat jam setelah Matsumoto meninggal, dilakukan otopsi. Menurutny terlihat ada tanda memar dan warna kulitnya terlihat tidak normal.

8. Hitomi Soga (Wanita, 19 Tahun)

- Diperkirakan diculik di Provinsi Niigata pada tanggal 12 Agustus 1978. Menghilang disaat pulang berbelanja bersama ibunya Miyoshi Soga.
- Hitomi Soga dikembalikan ke Jepang pada bulan Oktober 2002 bersama dengan empat orang lainnya. Suami (Charles Jenkins seorang warga negara Amerika Serikat) dan dua orang anaknya dikembalikan ke Jepang pada Juli 2004.

Miyoshi Soga (Wanita, 46 tahun)

- Diperkirakan diculik di Provinsi Niigata. Menghilang pada saat pulang berbelanja bersama anaknya Hitomi Soga pada tanggal 12 Agustus 1978.
- Korea Utara menyatakan bahwa Miyoshi Soga tidak pernah memasuki Korea Utara. Namun kemudian diralat. Korea Utara menyatakan bahwa Miyoshi Soga merupakan salah satu dari korban yang dinyatakan meninggal.
- Keberadaannya hingga kini tidak diketahui. Sejak diculik, ia dipisahkan dari Hitomi Soga dan tidak pernah dipertemukan.

9. Toru Ishioka (Pria, 22 Tahun)

- Diculik sekitar bulan Mei 1980 di Eropa.
- Ishioka mengirimkan surat kepada keluarganya di Jepang pada 13 Agustus 1988 (Cap Pos), menyatakan bahwa dirinya bersama dengan Kaoru Mastuki dan Keiko Arimoto berada di Korea Utara.
- Pemerintah Korea Utara menyatakan bahwa Ishioka dan Arimoto meninggal akibat insiden gas beracun pada bulan November 1988. Namun, pada kejadian tersebut, paspor Arimoto ditemukan dan dikembalikan ke Jepang, sedangkan paspor Ishioka dinyatakan tidak ditemukan.

Kaoru Matsuki (Pria, 26 Tahun)

- Diperkirakan diculik sekitar bulan Mei 1980 di Eropa, bersama dengan Toru Ishioka.
- Pemerintah Korea menyatakan bahwa Matsuki telah meninggal akibat kecelakaan mobil. Namun tidak ada kejelasan mengenai kejadian ini. Pada bulan November 2004, Korea Utara memberikan “Fragmen Tulang” Matsuki kepada pemerintah Jepang. Namun setelah diperiksa “Fragmen Tulang” tersebut terlalu kurus dari ukuran normalnya, dan setelah dilakukan pemeriksaan DNA, ditemukan DNA tersebut bukanlah DNA Matsuki.

- Menurut kesaksian orang terdekat dari Toru Ishioka, ia pernah mendengar nama Kaoru Matsuki, tetapi ia belum pernah bertemu. Tetapi berdasarkan surat yang dikirimkan Ishioka pada tahun 1988, ia menyatakan bahwa Matsuki tinggal bersama Ishioka dan Arimoto.

10. Tadaaki Hara (Pria, 43 Tahun)

- Menghilang di Provinsi Miyazaki. Diperkirakan diculik pada pertengahan Juni 1980.
- Menurut Sin Kwang Su, yaitu salah seorang agen rahasia Korea Utara yang ditugaskan menculik Hara, pada pengadilan di Korea Utara ia menyatakan bahwa pada tahun 1980 ia tiba di Pelabuhan Nampo dan menculik Tadaaki Hara. Ini bertentangan dengan pernyataan Korea Utara yang menyatakan bahwa Hara masuk melalui Haeju, dan ia tidak diculik tetapi masuk ke Korea Utara atas kemauannya sendiri bersama dengan Sin Kwang Su.

11. Keiko Arimoto (Wanita, 23 Tahun)

- Menghilang ketika sedang berada di Eropa (London). Diperkirakan diculik sekitar bulan Juli 1983.
- Pemerintah Korea Utara menyatakan bahwa Arimoto meninggal akibat insiden gas beracun pada tahun 1988 bersama dengan Toru Ishioka. Tetapi pemerintah Korea Utara tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kasus ini.
- Arimoto diperkirakan diculik oleh Kimihiro Uomoto seorang agen rahasia Korea Utara.

12. Kyoko Matsumoto (Wanita, 29 Tahun)

- Hilang pada 21 Oktober 1977, di Provinsi Tottori
- Kyoko diidentifikasi sebagai korban ke 17 oleh Jepang pada tahun 2006.

- Pemerintah Korea Utara menyangkal telah menculik Kyoko. Dan menyatakan bahwa Kyoko tidak pernah memasuki wilayah Korea Utara.

Sumber:

<http://mofa.go.jp/region/asia-paci/n_Korea/abduction/invest0412.pdf>

dan <<http://www.mofa.go.jp>>

Bila melihat kasus-kasus yang terjadi, kebanyakan penculikan dilakukan di daerah pantai Jepang. Hal ini dilakukan karena daerah pantai merupakan daerah yang mudah untuk dimasuki. Korea Utara memang negara yang sering memasuki wilayah perairan Jepang secara ilegal. Hal ini terbukti dengan sering ditemukannya kapal mata-mata Korea Utara yang berada masuk ke wilayah Jepang tanpa izin. Kapal tersebut berpura-pura sebagai kapal nelayan.

Saat ini, di museum penjaga pantai di Yokohama, dipamerkan sebuah kapal milik Korea Utara. Kapal tersebut mirip dengan kapal penangkap ikan, tetapi sebenarnya kapal ini dirancang untuk penggunaan tugas-tugas khusus. Pada 21 Desember 2001, kapal ini terlibat dalam aksi tembak-menembak dengan kapal penjaga pantai Jepang. Kemudian kapal tersebut tenggelam karena diledakkan sendiri oleh awak kapalnya. Misteri kapal tersebut berhasil terkuak setelah diangkat dari dasar laut pada 11 September 2002. Kapal ini beratnya 44 ton, panjang 29,68 meter dengan lebar 4,66 meter, bagian yang tenggelam mencapai 2,3 meter. Kecepatan maksimal 33 knot per jam dengan daya jelajah hampir 2.200 km, sedangkan jika kecepatannya 7 knot maka daya jelajahnya lebih jauh lagi yakni hampir 5.500 km. Kapal ini memuat kapal kecil dengan panjang 11,21 meter, lebar 2,5 meter dengan berat keseluruhan 2,9 ton. Kapal kecil ini memiliki kecepatan 50 knot atau hampir 90 km perjam dengan daya jelajah 150 mil laut atau hampir 270 km. Setelah diperiksa ditemukan pakaian tahan air, peluncuran roket kaliber 40 mm dan 8,5 mm, kanon B-10, senapan mesin ringan, senjata otomatis AK-74, granat tangan, dua tempat duduk senapan mesin, peta Prefektur Kagoshima dan lencana bergambar pimpinan Korea Utara Kim Il Sung. Namun, kepolisian Jepang belum memberikan keterangan apakah kapal tersebut

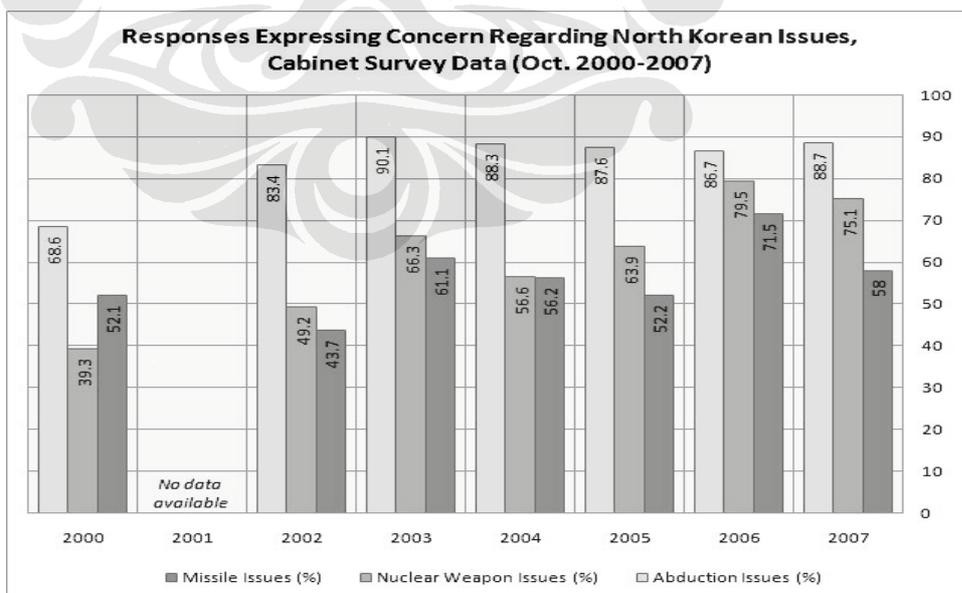
sama seperti yang digunakan untuk melakukan penculikan warga negara Jepang (Sjarifudin, 2003, para.6).

3.5 Reaksi di Dalam Negeri Jepang

3.5.1 Reaksi Masyarakat dan Peranan Media Masa

Ketika Kim Jong Il menyatakan pengakuannya mengenai kasus penculikan ini, masyarakat Jepang terutama keluarga para korban ‘*shock*’ mendengar bahwa hanya lima korban yang dinyatakan masih hidup. Oleh karena itu, bagi sebagian besar bangsa Jepang, permasalahan penculikan merupakan permasalahan utama dalam hubungan Jepang dan Korea Utara. Politisi dari seluruh partai di Jepang dan juga media masa menginginkan agar pemerintahan Koizumi tidak melakukan normalisasi hubungan tanpa ada kemajuan dalam kasus penculikan ini (Manyin, 2003, p.6).

Dukungan yang diberikan masyarakat terlihat dalam poling yang dilakukan oleh kabinet kerja pemerintah Jepang. Pada poling tersebut memperlihatkan bahwa kasus penculikan berada pada urutan teratas dibandingkan dengan permasalahan pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara.



Grafik 1:

Sumber: <http://abductionpolitics.net/2008/01/21/the-abduction-issue-and-japanese-long-term-strategic-trajectory>

Pada tanggal 3-8 Maret 2003, anggota keluarga dari korban penculikan dan pendukungnya datang mengunjungi Amerika Serikat untuk meminta bantuan kepada pejabat Amerika Serikat dan Anggota Kongres. Kemudian pada tanggal 20-23 April 2003, anggota keluarga penculikan tersebut juga mengunjungi Geneva untuk mempresentasikan masalah penculikan ini kepada *UN Human Rights Commission's Working Group (Japan-North Korea, 2004, para.17)*.

Sejak terungkapnya kasus penculikan Megumi Yokota pada tahun 1997, kasus ini mendapat perhatian luas dalam masyarakat, bahkan dapat dikatakan mendapatkan perhatian khusus. Hal ini tidak lepas dari usaha yang dilakukan oleh orang tua Megumi yang berusaha keras mencari informasi keberadaan anaknya. Usaha yang dilakukan oleh orang tua Megumi tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga meminta bantuan kepada negara asing seperti Amerika Serikat. Pada tanggal 28 April 2006, Sakie Yokota dan Takuya Yokota (ibu dan adik Megumi Yokota) datang mengunjungi Washington D.C untuk bertemu dengan Presiden G.W Bush. Sakie meminta bantuan kepada Amerika Serikat dalam hal pencarian kebenaran mengenai korban penculikan khususnya Megumi. Kunjungan ke *White House* ini pertama kalinya dilakukan oleh anggota keluarga korban penculikan (Snitch, 2006, para.3). Selain keluarga Megumi Yokota, Teruaki Matsumoto yang merupakan adik dari Rumiko Mastsumoto juga datang mengunjungi Washington D.C (Yamamoto dan Harden, 2007, para.25-29).

Untuk memudahkan dalam pencarian informasi, keluarga para korban penculikan membentuk sebuah asosiasi *Kazoku Kai (Association of the Families of Victims Kidnapped by North Korea [AFVKN])*. Asosiasi ini beranggotakan Shigeru Yokota, Sakie Yokota, Takuya Yokota, Tetsuya Yokota, Shigeo Iizuka, Teruaki Matsumoto, Akihiro Arimoto, Kayako Arimoto, Kenichi Ichikawa, Akio Terakoshi dan lainnya (berjumlah 21 orang, yang keseluruhannya adalah keluarga korban penculikan) (*NKRN News, 2005, para.2*).

Sejak pengakuan Kim Jong Il pada 17 September 2002 mengenai kebenaran berita penculikan ini, media masa Jepang banyak menyoroti Korea Utara. Dalam satu hari, televisi berita di Jepang memberitakan tiga sampai empat berita mengenai Korea Utara (McCormack dan Harumi, 2008, para.20). Pemberitaan tersebut tidak hanya menyoroti masalah penculikan tetapi juga berita

mengenai negara, sosial masyarakat dan nuklir sehingga menimbulkan *image* negatif masyarakat Jepang terhadap Korea Utara.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh David McNeill, banyak sekali berita utama di Jepang yang menjadi perhatian, tetapi berita mengenai penculikan ini, khususnya mengenai Megumi Yokota jumlah pemberitaannya lebih banyak dibandingkan dengan berita-berita lainnya (2006, para.8-23).¹³ Hal ini memperlihatkan betapa antusiasnya masyarakat Jepang terhadap kasus ini.

Dua orang pembuat film dari Amerika Serikat membuat film dokumenter mengenai penculikan Megumi Yokota ini, yang diberi judul “*Abduction: The Megumi Yokota Story*”. Pada tahun 2007, film ini diputar di dalam negeri Jepang dan di luar negeri. Film ini mendapatkan perhatian luas dari seluruh masyarakat Jepang maupun luar negeri. Selain pembuatan film dokumenter, kisah Megumi ini juga dibuat lagu. Lagu ini ditulis oleh Noel Paul Stookey yang diberi judul “*Song for Megumi*”.

3.5.2 Pembentukan Asosiasi

Selain AFVKN, terdapat juga asosiasi-asosiasi lain yang juga ikut berperan. Yaitu, (1) *Sukuu Kai (National Association for the Rescue of Japanese Kidnapped by North Korea [NARKN])* yang beranggotakan Katsumi Sato, Tsutomu Nishioka, Yoichi Shimada, dan 80 voluntir. Kemudian terdapat (2) *Rachi Giin Renmei (Association of Dietmembers for the Japanese Abductees)*, (3) *Investigation Commission on Missing Japanese Probably Related to North Korea (COMJAN)* dan (4) *The Parliamentarian League for Early Repatriation of Japanese Citizens Kidnapped by North Korea (PL)*. Asosiasi ini beranggotakan Takeo Hiranuma, Shingo Nishimura, Keiji Furuya, Hitoshi Matsubara, dan partisipan dari dua anggota parlemen termasuk Shinzo Abe (LDP), Katsuya

¹³ **Asahi Shinbun**: Berita mengenai Megumi Yokota 487 berita. Berita mengenai banyaknya penderita kanker akibat rokok di Jepang 24 berita. **Yomiuri Shinbun**: Berita mengenai Megumi Yokota 1128 berita. Berita mengenai “bunuh diri” dan usaha pencegahannya kurang dari 40 berita. **NHK**: Berita mengenai Megumi Yokota 346 berita. Berita mengenai rencana *Hamaoka* (pengembangan nuklir) dan dampaknya 16 berita. **Nikkei Net**: Berita mengenai Megumi Yokota 187 berita. Berita mengenai kecelakaan lalu lintas 8 berita. **Sankei Shinbun**: Berita mengenai Megumi Yokota 1086 berita. Berita mengenai kemiskinan kurang dari 20 berita. (Penelitian ini dilakukan oleh David McNeill yang mengambil data dari Oktober 2001 hingga Agustus 2006). Sumber: <http://www.Japanfocus.org/products/details/2231>

Okada (DPJ), Yukio Hatoyama (DPJ), Tokuhiko Akagi (*Chairman the Abduction Commission of the Upper House*), dan lainnya. Total anggota adalah 31 orang (*NARKN News*, 2005, para.4).

NARKN adalah koalisi dari organisasi non-profit yang secara bersama-sama menginginkan penyelamatan seluruh korban penculikan. Sejak konferensi pertamanya di Tokyo pada bulan April 1998, NARKN bekerja sebagai asosiasi nasional dunia. Saat ini NARKN terdiri dari 39 lokal NGO dan satu organisasi pemuda. NARKN berkerja bahu-membahu dengan AFVKN yang merupakan Asosiasi dari keluarga para korban penculikan.

Selain melakukan investigasi terhadap korban penculikan warga negara Jepang, NARKN dan AFVKN juga melakukan melakukan pencarian informasi terhadap kemungkinan adanya korban penculikan dari negara lain. Keterangan ini didapat berdasarkan keterangan dari para korban penculikan yang selamat. Dari mereka ini lah diketahui bahwa selain menculik warga negara Jepang, Korea Utara juga menculik warga negara asing lainnya. Keterangan ini diperoleh berdasarkan keterangan dari Hitomi Soga dan suaminya Robert Jenkins dan juga berdasarkan keterangan Choi Un Hee seorang artis Korea Selatan yang juga menjadi korban penculikan pada tahun 1978, namun kemudian berhasil melarikan diri pada tahun 1986. Berdasarkan wawancara yang dilakukan secara terpisah, ditemukan bahwa terdapat 11 negara lainnya yang warga negaranya juga menjadi korban penculikan. Negara tersebut adalah (1) Korea Selatan, terdapat 88.959 korban selama Perang Korea berlangsung dan 489 korban setelah terjadi gencatan senjata. (2) Lebanon 4 orang. Salah satu korban yang berhasil diketahui adalah Shiham Shraiteh. Pada bulan Juli 1978, empat orang korban ini ditawarkan untuk bekerja di perusahaan Jepang, tetapi kemudian mereka di bawa ke Korea Utara. Pada tahun 1979, dua orang korban berhasil melarikan diri kembali ke negaranya. Shiham menikah dengan Parrish yaitu seorang desertir Amerika Serikat. (3) Thailand 1 orang, yaitu Anocha Panjoy yang hilang pada bulan Juni 1978 di Macao. Kemudian ia menikah dengan desertir Amerika Serikat Larry Abshier pada tahun 1980. (4) Rumania 1 orang, yaitu Doina Bumbea. Ia diculik pada tanggal 2 Juli 1978 ketika sedang kuliah di Roma, Itali. Ia juga menikah dengan seorang desertir Amerika Serikat yaitu Dresnok. Pada tahun 1984, Doina

meninggal akibat kanker. (5) Cina 2 orang, yaitu Hong Leng-Ieng dan So Mio Chun yang diculik di Macao pada tanggal 2 Juli 1978 bersama dengan Doina. (6) Malaysia 4 orang, yaitu Yeng Yoke Fun, Yap Me Leng, Seetoh Tai Thim dan Margaret Ong Guat Choo. (7) Singapura 1 orang, yaitu Diana Ng Kum Yim. (8) Prancis 3 orang. (9) Italia 3 orang. (10) Belanda 2 orang. (11) Jordania 1 orang (*Worldwide Abductions*, 2006, para.4-29).

Sedangkan korban penculikan warga negara Jepang, ditemukan jumlah korban penculikan tidak hanya 17 orang korban seperti yang diakui oleh Korea Utara, tetapi tidak terduga terdapat jumlah korban penculikan mencapai 400 orang dengan waktu penculikan antara tahun 1940-an hingga tahun 2004 (COMJAN, 2005, Para.1). Namun belum seluruh korban hasil investigasi dibuka kepada masyarakat (Nama-nama korban hasil investigasi ini dapat dilihat pada Lampiran 3).

Masyarakat maupun asosiasi, menginginkan pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada Korea Utara, karena masyarakat menilai pemerintah terlihat terlalu lemah. Masyarakat ini menginginkan pemerintah untuk memberikan sanksi ekonomi, agar Korea Utara sedikit lebih serius dalam menyelesaikan kasus ini.

3.6 Pentingnya Kasus Penculikan Bagi Bangsa Jepang

Bagi sebagian negara, permasalahan penculikan warga negaranya atau masalah kemanusiaan mungkin bukanlah sebuah permasalahan besar yang menjadi permasalahan nasional. Kasus-kasus tersebut mungkin tertutupi dengan permasalahan negara lainnya yang dianggap lebih penting. Seperti kasus penculikan warga negara Thailand, Cina, Malaysia, Singapura, Rumania dan negara lainnya yang juga menjadi korban penculikan Korea Utara, negara-negara tersebut tidak melakukan penyidikan sama seperti yang dilakukan Jepang, yaitu menyelidiki sampai tuntas dan mendapatkan perhatian khusus dari masyarakatnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dilihat bahwa masalah penculikan merupakan masalah kemanusiaan yang penting di Jepang. Hal ini juga dikatakan oleh Perdana Menteri Yasuo Fukuda:

“The abduction issue is a serious human right issue. We will exert our maximum efforts to realize the earliest return of all the abductees, settle the ‘unfortunate past’, and normalize the relations between Japan and North Korea” (Takashi, 2007, p.9).

Terjemahan: “Kasus penculikan merupakan permasalahan kemanusiaan yang serius. Kami akan menggunakan segala upaya untuk segera mengembalikan seluruh korban penculikan, menyelesaikan “ketidak beruntungan dimasa lalu” dan menormalisasi hubungan antara Jepang dan Korea Utara.”

Banyaknya Asosiasi kemanusiaan yang khusus dibentuk untuk mencari informasi mengenai masalah penculikan, menambah kepastian mengenai pentingnya masalah kemanusiaan di Jepang. Masalah kemanusiaan termasuk kedalam permasalahan hak azazi manusia yang diatur oleh undang-undang hak azazi negara Jepang yang melindungi hak setiap warga negaranya (*Universal Declarations*, 2007, para.9-21):

Article 3: “Everyone has the right to life, liberty and security of person.”

Article 13: (1) “Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. (2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.”

Pasal 3: “Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, kemerdekaan dan jaminan keamanan diri.”

Pasal 13: (1) “Setiap warga negara memiliki hak untuk bebas pindah dan menetap di dalam batas setiap wilayah. (2) Setiap warga negara memiliki hak untuk meninggalkan negara mana saja, termasuk negaranya, dan kembali lagi ke negara asalnya.”

Pentingnya kasus kemanusiaan bagi Jepang tidak terlihat dalam kasus penculikan ini saja, tetapi Jepang juga ikut membantu permasalahan kemanusiaan lainnya di dunia. Pada tahun 1998, Jepang masuk kedalam *Human Right Watch*¹⁴ dengan mendirikan *International Criminal Court* (ICC). Program ICC ini akan melakukan penyelidikan terhadap genosida, tindakan kriminal dan kekerasan perang. Hingga tahun 2008, ICC ini telah ikut melakukan usaha penyelidikan kasus-kasus kemanusiaan di dunia. Seperti konflik di Afganistan dan Sri Lanka yang memakan banyak korban rakyat sipil, penangkapan oleh pemerintah terhadap pergerakan yang memprotes pemerintah di Birma, Tibet dan Uzbekistan, penculikan terhadap tentara perang, penyiksaan dan pembunuhan manusia di Sri Lanka, Korea Utara, Pakistan, Thailand dan Filipina (Doi, 2008, para.1).

Perhatian Jepang terhadap masalah kemanusiaan tidak hanya dilakukan melalui perannya dalam ICC tetapi juga melalui bantuan ekonomi. Jepang memberikan bantuan kemanusiaan melalui PBB dengan total US\$ 1 juta pada tahun 2000. Selain itu, Jepang juga memberikan US\$ 700,000 dan US\$ 111,000 bagi kemanusiaan di Rwanda dan Yugoslavia (*Human Right*, 2000, para.16). Terhadap negara yang mengalami bencana alam, Jepang juga memberikan bantuan kemanusiaan. Seperti terjadinya gempa bumi dan tsunami, Jepang segera mengirimkan tim bantuan ke Indonesia, Sri Lanka, Thailand dan Maldives dalam upaya membantu korban bencana. Tim ini meliputi tim medis, tim keselamatan (SDF), tim khusus untuk mengidentifikasi DNA, dan tim peneliti. Jepang juga memberikan bantuan sebesar US\$ 500 juta untuk membantu menanggulangi masalah kerusakan. Bantuan tersebut disalurkan melalui organisasi PBB seperti *United Nations Children's Fund* (UNICEF), *United Nations World Food Program* (WFP), *The International Organization For Migration* (IOM) dan *The International Federation Of Red Cross And Red Crescent Societies* (IFRC). Bantuan yang berikan kepada Indonesia sebesar US\$146 juta, Sri Lanka sebesar US\$ 80 juta dan Maldives sebesar US\$20 juta ("Japan's Contribution", 2005, p.24-25).

Pada tahun 2007, kasus penculikan yang melibatkan warga negara Jepang terjadi lagi. Tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2007, seorang pelajar Jepang,

¹⁴ *Human Right Watch* adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang memonitor seluruh organisasi kemanusiaan yang ada di dunia. Berlokasi di New York.

Satoshi Nakamura, 23 tahun diculik oleh kelompok penjahat Iran di wilayah perbatasan Afganistan dan Pakistan. Ia diculik di hotel dimana ia menginap ketika akan ke Bam, Provinsi Kerman untuk melihat benteng kuno. Nakamura datang ke Iran seorang diri untuk jalan-jalan setelah ia mengajar bahasa Jepang dan Inggris di Nepal sebagai kelompok voluntir. Ia dilepaskan pada bulan Juni 2008 setelah 8 bulan diculik. Pembebasan korban ini dilakukan setelah adanya negosiasi terhadap kelompok tersebut dengan bantuan negara Iran (Anwar, 2008, para.3-7).

Peduli terhadap masalah kemanusiaan ini telah menjadi identitas nasional bangsa Jepang. Dalam masyarakat Jepang, sifat yang menonjol adalah peranan kelompok dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sebenarnya tidak hanya terdapat pada bangsa Jepang, karena pada umumnya terdapat juga pada bangsa lain. Akan tetapi di Jepang wujudnya lebih kuat dan nyata. Peranan individu sangat dihargai, tetapi senantiasa dalam lingkungan serta kepentingan kelompok. Chie Nakane membedakan antara “kerangka” dengan “atribut” dalam posisi individu di dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan kerangka adalah lingkungan dimana individu itu berada atau di dalam kelompoknya, sedangkan atribut adalah tempat individu berada. Di Jepang, kerangka lebih penting dari pada atribut. Sebagai contoh, suatu rumah tangga merupakan satu kerangka kehidupan bersama, sedangkan anggota keluarga merupakan atribut dalam rumah tangga tersebut (Suryohadiprojo, 1987, p.42-43). Dikaitkan dengan kasus penculikan ini, negara merupakan sebuah kerangka, sedangkan masyarakat yang ada di dalamnya merupakan atribut. Dimana setiap masyarakat bersama-sama harus melindungi setiap anggotanya dan mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan individu.

Secara disadari atau tidak, kasus penculikan ini telah memunculkan semangat nasionalisme bangsa Jepang. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia (Hidayat, 2006, p.355). Ikatan nasionalisme tumbuh ditengah masyarakat yang terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempat ia hidup dan menggantungkan diri.

Dalam masyarakat Internasional, Jepang terkenal memiliki sikap loyalitas terhadap kelompoknya. Loyalitas ini diambil dari ajaran *bushido* (武士道). *Bushido* adalah suatu kode etik kaum Samurai yang tumbuh sejak terbentuknya Samurai (Suryohadiprojo, 1987, p.48). Berkembang di Jepang antara Zaman Heian dan Zaman Tokugawa (abad 9 hingga abad 12).

Pada Zaman Meiji, nilai-nilai *bushido* yang diterapkan adalah sikap rela mati untuk keagungan Kaisar yang berlaku sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus keturunan dewa. Meskipun kelas Samurai dihapuskan setelah Restorasi Meiji, tetapi nilai *bushido* masih tetap dipelihara. *Bushido* menganggap kesetiaan dan pengorbanan sebagai bagian dari kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan kekal.

Nilai *bushido* inilah yang menjadi dasar dari nasionalisme Jepang. Jiwa *bushido* ini, sengaja atau tidak, diwarisi orang Jepang secara umum sehingga menjadi dasar sikap orang Jepang yang mengutamakan kedisiplinan. Bila harga dirinya terluka, orang Jepang merasa malu, atau disebut *haji* (恥) (Suryohadiprojo, 1987, p.48). Inilah yang menjadi dasar dari pertanyaan, mengapa bangsa Jepang sangat fokus terhadap kasus penculikan bangsanya oleh Korea Utara. Bagi Jepang, kasus ini bukan hanya masalah penculikan, tetapi juga masalah harga diri bangsa.

Pemerintah membela sepenuhnya keadilan bagi bangsanya. Disinilah letak nilai semangat *bushido* tersebut. Jika pada Zaman Meiji nilai *bushido* adalah loyalitas kepada Kaisar, maka pada zaman modern ini *bushido* menjelma menjadi loyalitas kepada bangsa dan negara sebagai sikap patriotisme. Bangsa Jepang yang menjunjung keadilan dan kebenaran yang selalu dilakukan dalam kesehariannya, sangat menginginkan pemerintah Korea Utara memberikan keadilan dan kebenaran terhadap kasus ini.

Dalam *bushido*, hubungan antara sesama manusia sangat penting, oleh karena itu kasus penculikan ini tentu saja menjadi masalah yang serius dalam masyarakat Jepang. Simpati tidak hanya datang dari keluarga para korban saja, tetapi juga datang dari masyarakat Jepang lainnya. Banyaknya dukungan dari masyarakat, membuat pemerintah semakin gencar dalam mengusut dan menyelesaikan kasus ini.

Tetapi sayangnya tindakan kemanusiaan Jepang saat ini tidak diikuti dengan penyelesaian kasus kemanusiaan yang terjadi ketika Perang Dunia II. Karena kasus kemanusiaan yang dilakukan Jepang pada saat perang tersebut masih belum dianggap selesai bagi beberapa negara di dunia. Seperti permasalahan diskriminasi warga negara Korea Selatan dan Korea Utara, juga permasalahan Jugun Ianfu yang terjadi di berbagai negara Asia.



4. DIPLOMASI JEPANG DALAM MENGHADAPI MASALAH PENCULIKAN

Diplomasi adalah sebuah cara atau alat yang digunakan oleh sebuah negara untuk melakukan politik luar negerinya. Politik luar negeri suatu negara sesungguhnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun Internasional. Jadi, pada hakekatnya politik luar negeri merupakan lanjutan dari politik dalam negeri sebuah negara.

Politik luar negeri menjadi ujung tombak berkaitan dengan citra sebuah bangsa dimata dunia Internasional. Oleh sebab itu, politik luar negeri tidak dapat dikelola secara asal-asalan. Dalam hal ini, tentu saja tidak hanya dibutuhkan keberadaan para diplomat yang handal, melainkan juga kepemimpinan yang mampu merespon secara cepat berbagai persoalan Internasional, terutama yang berimplikasi langsung terhadap negara dan bangsa. Politik luar negeri suatu negara sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu politik domestik, kemampuan ekonomi dan militer, serta lingkungan Internasionalnya (Sihbudi, 2002, para.2).

Kemahiran seorang diplomat atau perwakilan pemerintah dalam mengambil kebijakan politik luar negeri, dapat memperkuat posisi negara tersebut dimata Internasional, karena sebuah keputusan, aspirasi, keinginan, sikap, kebebasan berbicara dan sebuah tindakan sangat berpengaruh untuk mengukur kekuatan struktur sebuah negara (Holsti, 1992). S.L Roy (1991) juga mengatakan bahwa besar atau kecilnya sebuah negara tidak mempengaruhi posisinya dimata Internasional. Tetapi yang mempengaruhi adalah kekuatan negara tersebut dalam berdiplomasi.

Jusuf Badri dalam bukunya “Kiat Diplomasi” menyatakan bahwa jika ditinjau dari aspek kemauan nasional, maka pelaksanaan politik luar negeri adalah melaksanakan, menyalurkan dan mengarahkan kemauan nasional ke bidang luar negeri dan jika ditinjau dari kepentingan nasional adalah menjaga dan mengabdikan

pada kepentingan nasional dalam aspeknya mengenai bidang luar negeri (2002, p.150).

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa politik luar negeri adalah kelanjutan dari politik dalam negeri sebuah negara, maka jika politik dalam negeri menuju pada berbagai tujuan yang saling bertentangan, pelaksanaan politik luar negeri tidaklah dapat berjalan diatas satu garis lurus yang searah. Kemudian jika politik dalam negeri menuju pada berbagai tujuan yang saling bertentangan, pelaksanaan politik luar negeri adalah tergantung dari aksi dan reaksi negara-negara lain dan dari berimbangan kekuatan Internasional.

Dengan demikian, dalam menentukan taktik dan strategi dari pelaksanaan politik dalam negeri baik faktor-faktor dalam negeri maupun faktor-faktor luar negeri harus diperhitungkan secara seksama. Terutama dalam hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu dengan kebijaksanaan yang telah dirumuskan, mutlak harus adanya suatu keseimbangan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa taktik dan strategi merupakan kebijaksanaan dalam wujud pelaksanaannya.

Dalam kasus Jepang, tentu saja Jepang memiliki kepentingan dalam negeri terhadap Korea Utara. Selain kepentingan politik ada kepentingan lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu kepentingan keamanan bangsa dan negara. Permasalahan-permasalahan yang terjadi antara Jepang dan Korea Utara telah membuat suatu keresahan tersendiri didalam negeri Jepang. Seperti permasalahan Senjata Pemusnah Masal yang dimiliki oleh Korea Utara sangat meresahkan negara. Karena senjata yang diarahkan ke wilayah Jepang tersebut mengandung alat peledak berisi bahan kimia yang dapat mengancam daerah industri dan pemukiman penduduk di Jepang. Jepang juga meragukan keakuratan sasaran percobaan rudal tersebut, mengingat tingkat teknologi Korea Utara yang dapat dikatakan belum canggih sehingga dapat membahayakan wilayah Jepang.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama dalam masalah di dalam negeri adalah mengenai keselamatan bangsa. Bila menyinggung mengenai keselamatan bangsa, maka pastilah berhubungan dengan keamanan dalam negeri (*Domestic Security*). Dalam diplomasi, pencapaian kesepakatan pastinya disesuaikan dengan harapan dalam negeri agar tercapai tujuan dan keamanan nasional. Menurut K.J. Holsti, dalam melakukan interaksi Internasional, setiap

negara memiliki maksud dan tujuan tertentu, yaitu (1) Untuk keamanan (2) Otonomi wilayahnya (3) Kesejahteraan bangsa (4) Status dan martabat bangsa (Holsti, 1992, p.83).

Bargaining power (kekuatan tawar-menawar) adalah sesuatu hal yang mutlak dibutuhkan dalam terciptanya kesepakatan negosiasi. Konsep ini membawa tekanan tersendiri bagi pemerintah untuk mampu membawa negosiasi kepada lingkungan objektif sebelumnya berdasarkan taktik dan strategi (Blaker, 1997, p.146). “Strategi” negosiasi menegaskan seluruh *bargaining design*, dan rencana secara umum untuk membawa diskusi pada suatu kesepakatan yang sukses. Sedangkan “taktik” adalah implementasi yang lebih spesifik lagi untuk mendukung strategi tersebut.

Namun, bila membicarakan mengenai permasalahan yang terjadi antara Jepang dan Korea Utara, maka juga tidak lepas dari adanya permasalahan kasus nuklir dan rudal yang dimiliki oleh Korea Utara. Oleh sebab itu, pihak Jepang sejak semula melaksanakan bentuk diplomasi ganda dalam menyelesaikan dua pokok permasalahan yang harus dihadapinya. Artinya, bahwa Jepang berusaha keras menggandengkan diplomasi penanganan masalah nuklir Korea Utara menjadi satu paket dengan masalah penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara (Irsan, 2007, p.134). Hal ini dilakukan agar Jepang mendapatkan dukungan negara lain sehingga kasus penculikan ini dapat dengan cepat diselesaikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana taktik dan strategi yang dilakukan Jepang dalam menghadapi Korea Utara mengenai penyelesaian kasus penculikan yang telah menjadi hambatan dalam normalisasi hubungan kedua negara. Sebelum membahas mengenai permasalahan tersebut, akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana keadaan perekonomian Korea Utara.

4.1 Latar Belakang Ekonomi Korea Utara

Dasar pokok kebijakan politik nasional Korea Utara adalah membentuk negara sosialis yang kuat melalui kekuatan militer, dengan bentuk kepemimpinan nasional yang dihormati. Kim Jong Il merupakan figur pemimpin yang

mengontrol hampir semua kegiatan pemerintah dan negara, termasuk angkatan bersenjata. Meskipun kondisi ekonomi Korea Utara sangat memprihatinkan, dan sangat tergantung uluran tangan bantuan dari luar negeri, tetapi Korea Utara tetap memprioritaskan kebijakan negara untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan militer dalam menghadapi kemungkinan ancaman terhadap negara. Dalam masyarakat Korea Utara, militer memiliki kedudukan dan status sosial yang tinggi yang sangat dihormati masyarakat (Irsan, 2007, p.168). Kekuatan militer yang dimiliki Korea Utara terbilang cukup besar, yaitu dengan populasi penduduk sekitar 22 juta jiwa, Korea Utara memiliki jumlah militer lebih dari 1 juta tentara aktif dan 4.7 juta tentara cadangan (Bruner, 2003, p.1).

Hingga saat ini, Korea Utara merupakan salah satu negara miskin di dunia. Buruknya perekonomian, mengakibatkan kemiskinan pada rakyat. Ketertutupan Korea Utara terhadap dunia luar mengakibatkan sulitnya negara lain untuk berinvestasi sehingga ekonomi negara pun tidak terbantu. Tidak sedikit rakyat Korea Utara berusaha melarikan diri ke negara lain untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan. Dari mereka inilah dunia luar mengetahui bagaimana keadaan Korea Utara yang sebenarnya.

Namun, kepercayaan Korea Utara terhadap “*Underground Money*” membawa perekonomian negara ini tumbuh dengan cepat. Hal ini dikarenakan dampak dari Perang Dingin yang membawa perekonomian negara ini menjadi sulit. Terjadinya Perang Korea, membuat Uni Soviet mendukung perekonomian Korea Utara untuk menghadapi tentara Korea Selatan dan serangan dari Amerika Serikat. Dukungan tersebut adalah dalam bentuk suplai minyak dengan harga murah dan bantuan lainnya. Tetapi pada akhir tahun 1980-an dan di awal tahun 1990-an Uni Soviet dan rezim lainnya di Blok Timur terpecah, sehingga membawa perpecahan komunis. Negara-negara bekas Uni Soviet memberikan minyak kepada Korea Utara bukan lagi sebagai bantuan tetapi sudah sebagai aktivitas ekonomi. Dengan perekonomian yang tidak stabil, Korea Utara tidak bisa membayar transaksi ini, sehingga impor minyak Korea Utara dari 400.000 ton di tahun 1990 menjadi hanya 42.000 ton di tahun 1991. Ditambah pula Cina yang dahulunya merupakan pendukung utama Korea Utara, juga mulai

memprioritaskan perkembangan ekonomi dalam negerinya dan menjaga jarak dengan Korea Utara¹⁵ (Masashi, 2003, p.42).

Dalam keadaan sulit seperti ini, Korea Utara mengambil jalan cepat untuk mendapatkan uang sehingga perekonomian negaranya dapat dengan cepat teratasi. Korea Utara melakukan ekspor Rudal *Rodong (Nodong)*, perdagangan obat-obatan terlarang, membuat dolar palsu dan mendapatkan “dana gelap” (Takashi, 2003, p.35).

Menurut *South Korea's National Intelligence Service*, perkembangan ekonomi Korea Utara naik secara drastis. Dari tahun 1992 hingga 1993 Korea Utara menyediakan lahan untuk mendukung bisnisnya sepuluh kali lipat dari sebelumnya. Pada bulan Mei 2003, seorang pejabat Korea Utara memberikan informasi kepada Senat Amerika Serikat mengenai perdagangan narkotika yang dilakukan oleh Kim Jong Il dan memberi tahu dimana lokasi produksi obat-obatan tersebut. Lagipula, setelah Kim Il Sung meninggal pada bulan Juli 1994, kekuasaan jatuh sepenuhnya kepada Kim Jong Il. Sehingga perdagangan narkotika pun semakin kuat. Namun sayangnya, perdagangan ini dipergunakan Kim Jong Il hanya untuk memperkaya dirinya. Sedangkan perekonomian negara menjadi semakin terpuruk dan kehidupan layak bagi rakyat pun tidak terpenuhi (Masashi, 2003, p.42).

Sejak kepemimpinan Kim Jong Il, rezim di Korea Utara tidak sestabil kepemimpinan Kim Il Sung. Kesenjangan antara mereka yang kaya dan yang miskin sangat terlihat, para pemimpin mementingkan kekayaan, kondisi moral dan disiplin anggota militer semakin mundur. Sistem kepemimpinan dikuasai hanya oleh mereka yang dekat dengan Kim Jong Il. Sementara itu keadaan ekonomi Korea Utara mengalami stagnasi dan mengalami kekurangan makanan dan energi yang mengakibatkan terjadinya kelaparan dan semakin mempengaruhi kondisi moral bangsa. Walaupun pada tahun 2002 Korea Utara telah berusaha melakukan reformasi untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat, tetapi pertumbuhannya masih sangat lambat (Irsan, 2007, p.16-17).

¹⁵ Perubahan sikap Cina ini diakibatkan oleh terjadinya krisis ekonomi Cina yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Hal tersebut juga disebabkan oleh lemahnya sektor perbankan, korupsi yang merajalela, meningkatnya populasi manula dan juga akibat adanya konflik militer dengan Taiwan.

4.2 Diplomasi Jepang Terhadap Korea Utara

4.2.1 Diplomasi Langsung

Diplomasi langsung disini maksudnya adalah diplomasi yang langsung dilakukan Jepang kepada Korea Utara tanpa adanya campur tangan negara lain. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, berkaitan dengan diplomasi Jepang terhadap Korea Utara, permasalahan yang terjadi antara Jepang dan Korea Utara bukan sebuah kasus yang mudah untuk dicari jalan keluarnya. Apalagi kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi sehingga permasalahan yang terjadi diantara kedua negara pun sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, Jepang harus memiliki taktik dan strategi tersendiri untuk mencapai tujuannya.

Pembicaraan mengenai kasus warga negara Jepang yang diculik oleh agen rahasia Korea Utara ini terkadang mengalami kemajuan namun terkadang kembali mundur. Butuh kegigihan, ketekunan dan kesabaran dari pihak Jepang agar Korea Utara bersedia mengakui dan mengembalikan korban penculikan dalam kondisi hidup atau meninggal.

Bila melihat kondisi perekonomian negara Korea Utara, negara ini sangat membutuhkan bantuan dari negara lain, dan Jepang menyadari bahwa negaranya merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dengan perekonomian yang kuat ini, Jepang dapat membantu perekonomian negara miskin dan negara berkembang dalam bentuk keuangan ataupun dalam bentuk investasi. Hal inilah yang dilakukan Jepang terhadap Korea Utara. Dalam usaha menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi diantara kedua negara, Jepang melakukan diplomasi melalui bantuan ekonomi termasuk dalam hal penyelesaian kasus penculikan.

Pada tanggal 4-5 Mei 2004, disaat pertemuan puncak kedua antara Perdana Menteri Koizumi Junichiro dengan Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara Kim Jong Il di Beijing, Jepang menekankan kepada Korea Utara untuk segera mengembalikan keluarga para korban penculikan kembali berkumpul bersama keluarganya di Jepang. Pada kesempatan tersebut, Jepang menjanjikan akan memberi bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara sebesar 250.000 ton bahan makanan dan US\$10 juta bantuan dalam bentuk obat-obatan melalui organisasi kemanusiaan Internasional (Hirotaka, 2004, p.6).

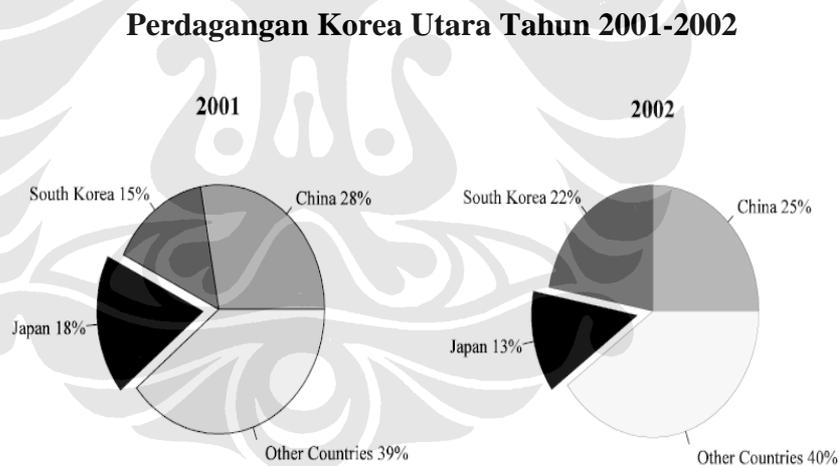
Menanggapi janji Jepang tersebut, sebagai reaksinya Korea Utara mengembalikan keluarga para korban penculikan pada tanggal 22 Mei 2004 bersama dengan pulangnya Perdana Menteri Koizumi. Tetapi, meskipun korban penculikan dan keluarganya telah dikembalikan oleh Korea Utara, kasus ini masih belum dianggap selesai bagi Jepang. Pemerintah Jepang masih menuntut pemerintah Korea Utara untuk memberikan keterangan pasti mengenai korban yang dinyatakan meninggal atau pun yang tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, pada bulan Agustus 2004 pemerintah Jepang menepati janjinya kepada Korea Utara dengan hanya memberikan setengah dari jumlah bantuan yang dijanjikan. Yaitu, 125.000 ton bahan pangan (sejumlah US\$40 juta) dan US\$7 juta dalam bentuk bantuan obat-obatan melalui WFP. Sisa bantuan akan diberikan apabila Korea Utara telah memenuhi keinginan Jepang untuk memberikan keterangan dan bukti mengenai korban meninggal tersebut.

Bantuan ekonomi ini, tidak kali ini saja diberikan oleh Jepang kepada Korea Utara. Bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara telah diberikan Jepang sejak tahun 1990-an (Manyin, 2003, p.14). Bantuan tersebut bermula pada tahun 1995, dimana pada saat itu untuk menghadapi krisis perekonomian dalam negeri (akibat pengurangan bantuan dari Cina dan Uni Soviet), Korea Utara membutuhkan bantuan dari negara-negara asing agar kesejahteraan masyarakatnya dapat terbantu. Pada awalnya, untuk mengatasi kesulitan tersebut, sejak tahun 1995 PBB memberikan bantuan untuk mengatasi masalah kemanusiaan sebesar US\$ 184 juta. Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar US\$ 52 juta, EU (European Union) juga ikut memberikan bantuan sebesar 46 juta ECUs (sekitar US\$ 53.8 juta), termasuk juga bantuan dari *World Food Programme* (WFP) (Diplomatic Blue Book 1998, 1998, para.51).

Berdasarkan keterangan tersebut, untuk mendapatkan perhatian dari Korea Utara, Jepang memutuskan untuk masuk kedalam suatu komunitas Internasional yang bergerak dalam bidang bantuan kemanusiaan. Pada tahun 1995, bantuan yang diberikan Jepang adalah kontribusi sebesar US\$ 27 juta melalui WFP. Bantuan tersebut berupa bantuan makanan bagi anak-anak dan bantuan obat-obatan yang merupakan gabungan dari PBB. Kemudian Jepang juga memberikan kontribusi keuangan sebesar ¥94 juta bagi persediaan obat-obatan melalui

International Federation of Red Cross (IFRC) dan *Red Crescent Societies*. WFP juga memberikan bantuan beras kepada Korea Utara sebesar 67.000 ton yang berasal dari pemerintah Jepang pada tahun 1997 (Diplomatic Blue Book 1998, 1998, para.52). Pada tahun 2000, pemerintah Jepang mengirimkan bantuan kepada Korea Utara sebesar 600,000 ton beras.

Hingga kini, Jepang merupakan salah satu negara terbesar yang memberikan bantuan kepada Korea Utara. Dalam bidang perdagangan, setelah Uni Soviet menghentikan bantuannya kepada Korea Utara, Jepang muncul sebagai *partner* perdagangan terbesar Korea Utara setelah Cina hingga tahun 2001 dan ketiga setelah Korea Selatan pada tahun 2002. Ekspor utama Korea Utara ke Jepang berupa kulit kerang, pakaian, *mushrooms* dan batu bara. Ekspor utama Jepang ke Korea Utara adalah mobil, komponen elektronik, wol dan perlengkapan mesin (Manyin, 2003, p.12).



Grafik 2

Sumber: KOTRA (Korea Trade Investment Promotion Agency) and South Korean Ministry of Unification.

Faktor-faktor ekonomi telah memainkan peranan dalam hubungan-hubungan diplomatik. Tetapi dalam dunia sekarang ini aspek ekonomi dari diplomasi telah memperoleh kedudukan penting yang semakin besar. Saat ini

aspek ekonomi tersebut dianggap sebagai bagian integral dalam diplomasi (Roy, 1991, p.127). Diplomasi ekonomi tidak hanya dilakukan oleh Jepang, negara-negara besar lain pun melakukan strategi diplomasi ini terhadap negara lain. Jepang hingga saat ini juga melakukan diplomasi ekonomi melalui bantuan ODA (*Official Development Assistance*). ODA adalah bantuan resmi pemerintah Jepang kepada negara-negara miskin dan berkembang yang memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Jepang. Bantuan ODA ini adalah bantuan untuk pembangunan negara. Banyak negara yang memperoleh bantuan ODA, seperti Indonesia, Afrika, Cina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Meksiko, Sri Lanka, Thailand, Filipina dan masih banyak negara lainnya (Sing, 2001, p.269).

Tidak diragukan lagi bahwa Jepang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi Asia. Tanpa modal, teknologi dan pengetahuan manajerial yang didapat dari Jepang, proses industrialisasi dan modernisasi di Asia selama ini pasti akan jauh lebih lambat. Kontribusi Jepang akan terus menjadi sebuah faktor penarik yang penting dan tidak dapat diabaikan dalam pembangunan ekonomi Asia dan dunia yang pesat (Sing, 2001, p.250).

Didalam diplomasi ekonomi ini, setiap negara yang memiliki kekuatan ekonomi, mempunyai hak untuk melakukan atau memberikan sanksi ekonomi. Dalam kasus Korea Utara, didalam negeri Jepang ada pihak yang menghendaki sikap yang lebih tegas dan radikal terhadap Korea Utara dan ada pula yang cenderung bersikap melakukan pendekatan yang lebih halus. Kelompok radikal tersebut menginginkan pemerintah Jepang untuk melakukan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara. Pada awalnya Koizumi enggan untuk melakukan sanksi tersebut terhadap Korea Utara. Meskipun terdapat “paksaan” dari masyarakat agar pemerintah melakukan sanksi ekonomi, namun pemerintah masih belum dapat melakukan hal tersebut. Koizumi merasa bahwa dengan melakukan dialog akan lebih baik. Hal ini terjadi adalah karena bangsa Jepang tidak terbiasa dengan negosiasi melalui kekerasan atau seperti yang dilakukan oleh Barat, yaitu selalu mengajak pihak yang sedang berunding untuk langsung berdiskusi dan melakukan perdebatan sebelum mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal ini Barat juga dapat memberikan sebuah sanksi sepihak tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Sedangkan bangsa Jepang cenderung untuk mencari solusi dengan cara pendekatan

yang lebih bersahabat melalui kompromi yang didasari suatu *groundwork* yang jelas (*Nemawashi* (根回し)),¹⁶ sebelum tercapai kesepakatan akhir (Irsan, 2007, p.62-63).

Pemikiran untuk melakukan sanksi ekonomi semakin meluas setelah DNA Megumi Yokota dinyatakan sebagai DNA “palsu” oleh pemerintah Jepang. Jepang merasa bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan sanksi tersebut, karena Korea Utara seolah-olah tidak dapat untuk diajak berdiskusi lagi. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Desember 2004, pemerintah Jepang memutuskan untuk membekukan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara. Tetapi sayangnya, efek dari pembekuan ekonomi tersebut, tidak seperti yang dibayangkan oleh pemerintah Jepang. Karena sanksi ekonomi tersebut membawa hubungan ekonomi Korea Utara lebih dekat dengan Cina dan Korea Selatan. Pada tahun 2003, perdagangan Korea Utara dengan Korea Selatan berjumlah US\$ 700 juta, dan perdagangan dengan Cina lebih dari US\$ 1 miliar. Cina dan Korea Selatan secara global tercatat melakukan perdagangan sebanyak 55% bagi Korea Utara, sedangkan Jepang hanya 8%. Selain itu bantuan yang diberikan Cina dan Korea Selatan kepada Korea Utara jumlahnya juga lebih besar dibandingkan dengan Jepang. Cina memberikan bantuan minyak dan bantuan lainnya kepada Korea Utara, sedangkan Korea Selatan memberikan bantuan pangan kepada Korea Utara sebesar 400.000 ton setiap tahunnya. Hingga tahun 2005, hubungan Korea Utara dengan Cina dan Korea Selatan semakin kuat dengan banyaknya bantuan yang diberikan dan investasi yang dilakukan kedua negara (Hajime, 2005, p.23).

Namun, pemerintah Jepang berfikir bahwa dengan dukungan yang didapat Korea Utara dari Cina dan Korea Selatan tidaklah dapat mencukupi perekonomian dalam negeri Korea Utara. Sehingga pada akhirnya, untuk memenuhi seluruh kebutuhan perekonomiannya, Korea Utara tetap membutuhkan bantuan keuangan dari Asosiasi ataupun negara-negara Internasional termasuk bantuan dari Jepang

¹⁶ *Nemawashi* adalah suatu kebiasaan untuk berdiskusi atau tukar menukar pendapat dan informasi sebelum mengambil sebuah keputusan. Sebelum mengambil keputusan yang dianggap penting, orang Jepang melakukan konsultasi dengan orang lain dan tukar pikiran dengan sesama anggota kelompok kerjanya atau dengan pihak-pihak lain yang terkait. *Nemawashi* merupakan sarana manajemen untuk menyatukan visi anggota manajemen sebelum membuahakan suatu kesepakatan bersama. Karena melalui proses *nemawashi* tersebut setiap anggota manajemen dapat saling berbagi informasi secara vertikal maupun horizontal, sehingga memungkinkan terbentuknya kesamaan visi dan sebelum proses pembuatan keputusan.

dan Amerika Serikat. Dalam hal ini, apabila Korea Utara akan meminta bantuan kepada Bank Dunia atau kepada *Asian Development Bank* (ABD), pertama-tama Korea Utara harus mendapatkan jaminan dari Jepang dan Amerika Serikat, karena dalam hal ini Jepang dan Amerika Serikat memiliki kuasa. Dalam ABD, kedua negara ini memiliki hak Veto¹⁷ (Hajime, 2005, p.23).

Selain faktor ekonomi tersebut, terdapat hal lain yang memunculkan keraguan Jepang. Yaitu dengan adanya aktivitas ilegal (kriminal) yang dimiliki Korea Utara, yang telah meningkatkan perekonomian negara tersebut. Salah satu aktivitas ilegal yang diduga memberikan perekonomian terbesar adalah perdagangan senjata dan rudal. Perdagangan ini diduga dilakukan kepada Iran, Irak, Libiya, Pakistan, Yaman dan Vietnam. Selain itu, aktivitas ilegal lainnya adalah perdagangan obat-obatan palsu yang juga merupakan perdagangan yang memberikan masukan ekonomi besar kepada Korea Utara. Apalagi dalam hal ini Jepang merupakan pasar terbesar dari perdagangan tersebut (Kim Young, 2003, para.3).

Perekonomian yang didapatkan Korea Utara dari aktivitas ilegalnya tersebut diduga tidak dimasukkan kedalam perekonomian negara, tetapi adalah untuk kepentingan pribadi Kim Jong Il dan kelompok elit lainnya. Kelompok inilah yang memiliki hak istimewa dalam mengatur negara, sehingga semakin sulit untuk memperkirakan berapa besar jumlah perekonomian yang dimiliki oleh Korea Utara. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk dapat melakukan sanksi ekonomi secara efektif adalah dengan memblok sumber pendapatan ilegal tersebut (Hajime, 2005, p.24).

Selain itu, juga terdapat kekhawatiran Jepang terhadap militer dan senjata pemusnah massal yang dimiliki oleh Korea Utara. Jepang khawatir, jika Jepang melakukan sanksi ekonomi, maka kemungkinan Korea Utara akan melakukan serangan dengan meluncurkan rudal jarak jauh dan jarak menengahnya ke wilayah Jepang termasuk ke pangkalan militer Amerika Serikat. Seperti ancaman yang pernah dilakukan oleh Korea Utara yang menyatakan bahwa kekuatan rudal yang dimiliki oleh Korea Utara dapat menjangkau wilayah Jepang dimana saja

¹⁷ Bantuan ABD dilakukan berdasarkan persetujuan dari 2/3 negara anggota yang memiliki kontribusi 75% dari modal. Dimana Jepang dan Amerika Serikat masing-masing memiliki kontribusi sebesar 13,2%.

(Manyin, 2003, p.6). Kekhawatiran Jepang ini dapat dimaklumi, Karena Jepang tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk melawan Korea Utara, seperti yang diketahui bahwa Jepang hanya memiliki pasukan bela diri (*Self-Defense Forces* [SDF]). Jepang khawatir jika memberikan sanksi ekonomi yang keras, maka Korea Utara akan menanggapi dengan keras seperti yang dialami oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1994, Amerika Serikat melakukan sanksi ekonomi kepada Korea Utara akibat Korea Utara tidak mau menghentikan program nuklirnya. Tindakan Amerika Serikat tersebut ditanggapi oleh Korea Utara dengan ancaman akan menyerang dan bahkan mendeklarasikan sebuah perang. Namun ancaman tersebut tidak ditanggapi oleh Amerika Serikat. Hal ini disebabkan situasi di Irak menyebabkan kondisi Amerika Serikat tidak dapat melakukan serangan ke Korea Utara (Hajime, 2005, p.25).

Dalam militer, Jepang memang memiliki sebuah perjanjian dengan Amerika Serikat bahwa masalah keamanan Jepang berada dibawah perlindungan Amerika Serikat yang dituangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar Jepang. Meskipun saat ini, Jepang sebagai negara maju hanya memiliki pasukan bela diri (SDF), tetapi sebenarnya pasukan ini memiliki kemampuan tinggi dengan peralatan yang berteknologi canggih. Jumlah keseluruhannya diperkirakan sebanyak 140.000 pasukan, 140 kapal angkatan laut dengan bobot 398.000 ton dan memiliki sejumlah 480 pesawat terbang militer. Pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Jepang dengan tugas utama melindungi wilayah Jepang berjumlah sekitar 21.000 anggota, yang didukung oleh sejumlah 130 pesawat terbang militer. Armada ketujuh Amerika Serikat yang juga berfungsi sebagai bagian dari sistem pertahanan Jepang, berkekuatan 40 buah kapal dengan total bobot 610.000 ton yang diperkuat dengan 70 pesawat terbang yang siap siaga di kapal induk (Irsan, 2007, p.159).

Namun, kekuatan ini dirasa belum cukup untuk menahan serangan dari Korea Utara. Kekhawatiran akan serangan ini juga dirasakan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat yang memiliki kepentingan utama dalam permasalahan nuklir Korea Utara, tidak mengambil keputusan tegas seperti yang dilakukannya terhadap Irak. Di Irak, saat ini Amerika Serikat menempatkan 150.000 pasukan dan 33.000 pasukan di Kuwait. Kemudian pasukan ini akan di rotasi secara

berkala. Selain itu, divisi kedua infantri militer Amerika Serikat ditempatkan di pangkalan militer Amerika Serikat di Korea Selatan. Hal ini yang menjadi kendala bagi Amerika Serikat, dimana untuk melakukan serangan ke Korea Utara, Amerika Serikat membutuhkan kurang lebih 100.000 pasukan dan saat ini posisi Amerika Serikat tidak berada dalam posisi yang kuat untuk menyerang Korea Utara (Hajime, 2005, p.25).

Hingga tahun 2006, Korea Utara belum juga memenuhi janjinya untuk memberikan keterangan mengenai korban penculikan yang dinyatakan meninggal dunia. Kekesalan Jepang berlanjut ketika pada tanggal 5 Juli 2006 Korea Utara kembali meluncurkan rudal balistik sebanyak tujuh buah termasuk *Taepodong 2*. Segera setelah percobaan peluncuran rudal tersebut, Jepang melakukan penutupan pelabuhan di Niigata bagi Feri *Man Gyong Bong-92*¹⁸ dan menghentikan penerbangan pesawat carter dari Pyongyang. Pelarangan Feri *Man Gyong Bong-92* ini tidak hanya berlaku sementara bagi perdagangan dan wisata melalui kapal, tetapi juga mengetatkan peraturan bagi *Chosen Soren* dalam melakukan hubungan dengan Korea Utara. Dua bulan setelah itu, pemerintah Jepang kembali menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara. Pada tanggal 19 September, Dewan Kabinet membekukan deposito dan menarik lisensi pengiriman uang bagi para pemegang lisensi bagi 15 kelompok yang tergabung dalam hubungan kedua negara (Miyamoto, 2004, p.22).

Pada tanggal 9 Oktober Korea Utara kembali melakukan percobaan nuklir. Sikap Korea Utara tidak hanya mendapatkan protes dari Jepang saja, tetapi juga mendapatkan protes keras dari negara Internasional, terutama negara yang tergabung dalam *Six Party Talks*. Apalagi pada tahun 2003, Korea Utara telah keluar dari IAEA (*International Atomic Energy Agency*).

Jepang yang merasa bahwa percobaan kedua senjata tersebut merupakan ancaman bagi negara dan bangsanya dan juga dikarenakan perkembangan mengenai kasus penculikan dirasa sangat lambat, pada akhirnya pada tanggal 13 Oktober 2006, Jepang kembali melakukan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara.

¹⁸ Feri *Mang Gyong Bong-92* ini merupakan alat transportasi utama Korea Utara ke Jepang. Baik perdagangan maupun wisata. Feri ini masuk ke pelabuhan Jepang satu minggu sekali. Biasanya Feri ini digunakan oleh *Chosen Soren* dalam melakukan aktivitas perdagangannya. Feri ini mempunyai rute dari Wosan ke Niigata.

Jepang juga menutup pelabuhannya bagi seluruh kapal Korea Utara dan juga melakukan embargo terhadap seluruh impor dari Korea Utara. Sanksi ini diberikan selama enam bulan (“Policy on the”, 2006, p.2). Sanksi ini juga ditargetkan Jepang kepada tiga perusahaan, yaitu *Korea Tonghae Shipping Company*, *Pyongyang Informatics Center* dan *Ponghwa Hospital* (Lee dan Choi, 2007, p.39-40).

Mengikuti sanksi ini, pemerintah Jepang juga melarang para pejabat Korea Utara untuk mengunjungi Jepang selama enam bulan. Sanksi ini berlanjut hingga bulan April 2007 kemudian diperpanjang hingga bulan Oktober 2007 dan kembali diperpanjang hingga tahun 2008 (Lee dan Choi, 2007, p.41). Pada tahun 1998, sebenarnya Jepang pernah melakukan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara. Yaitu pada bulan September 1998, Jepang menunda seluruh bantuannya terhadap Korea Utara menyusul dilakukannya tes rudal balistik (Taepodong 1) yang diluncurkan pada bulan Agustus melewati wilayah Jepang (Pulau Honshu) dan jatuh di Laut Pasifik. Pada saat itu, Jepang melakukan blokade terhadap Feri *Man Gyong Bong-92* secara berkala. Namun, setelah dilakukan negosiasi dan Korea Utara berjanji tidak melakukan tes rudal balistik kembali, maka pada bulan Desember, Jepang menarik sanksi tersebut. Kemudian diikuti dengan mengirimkan 100.000 ton beras kepada Korea Utara pada bulan Maret 1999 (“Stalemate in China”, 2000, p.10).

Pada masa pemerintahan Shinzo Abe yang menggantikan Koizumi sebagai Perdana Menteri pada bulan September 2006, permasalahan penculikan ini tidak mengalami banyak perkembangan. Padahal, masyarakat dan negara Internasional beranggapan bahwa kasus ini akan mengalami banyak kemajuan ditangan Shinzo Abe. Karena pada saat pemerintahan Junichiro Koizumi, Shinzo Abe merupakan orang yang paling menaruh perhatian dalam menyelesaikan kasus tersebut. Pemerintahan Shinzo Abe justru tidak melakukan banyak tekanan terhadap Korea Utara. Pada pemerintahan Yasuo Fukuda saat ini, masyarakat mengharapkan pemerintah akan kembali membuka konsentrasi terhadap kasus penculikan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan (Lee dan Choi, 2007, p.42).

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, pada awalnya Koizumi tidak mau memberikan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara, namun mengapa pada

akhirnya sanksi ekonomi tersebut dilakukan? Pada kunjungan Koizumi ke Pyongyang pada tanggal 22 Mei 2004, ia menyatakan kepada Kim Jong Il bahwa “Saya tidak akan menjatuhkan sanksi ekonomi sejauh Korea Utara taat terhadap Deklarasi Pyongyang.” Pernyataan Koizumi ini banyak menuai protes di dalam negeri. Karena banyak pihak Jepang yang sebenarnya menginginkan Jepang melakukan sanksi ekonomi tersebut. Seperti AFVKN mengkritik Koizumi karena ia dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan penculikan ini (Miyamoto, 2006, p.42).

Tekanan terhadap Koizumi semakin terasa ketika Korea Utara tidak mau mengembalikan delapan orang keluarga dari korban penculikan ke Jepang. Tekanan terhadap Koizumi juga datang dari parlemen dan partai politik di Jepang. LDP (*Liberal Democratic Party*), NK (*New Komeito*) dan DPJ (*Democratic Party of Japan*) setuju dengan keputusan dari amandemen LSMCIPESS (*The Law for Special Measures Concerning Interdiction of Ports Entry by Specifics Ship*)¹⁹ yang menyatakan bahwa menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara adalah salah satu cara untuk membantu stabilitas keamanan di Jepang (Miyamoto, 2006, p.25).

Pada akhirnya, Koizumi melakukan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara. Hal ini tidak saja dikarenakan adanya tekanan dari masyarakat ataupun parlemen, tetapi karena Korea Utara melanggar perjanjian Deklarasi Pyongyang dengan kembali melakukan percobaan peluncuran misil dan nuklir pada tahun 2006 (Miyamoto, 2006, p.42-43).

Diplomasi ekonomi yang dilakukan Jepang, terlihat tidak banyak mempengaruhi keputusan Korea Utara dalam kasus penculikan ini. Karena hingga tahun 2008, kasus penculikan ini masih belum menemukan kepastian dari Korea Utara. Diplomasi ekonomi yang dirasa Jepang akan memberikan banyak kemajuan, ternyata tidak cukup efektif. Sikap ini dilakukan oleh Korea Utara adalah karena hingga saat ini, Jepang masih tidak mau memenuhi keinginan Korea Utara untuk memberikan kompensasi perang dalam bentuk keuangan sebagai ganti rugi akibat masa kolonialnya di Korea pada tahun 1910-1945. Korea

¹⁹ LSMCIPESS adalah sebuah pilar dari sebuah hukum sanksi ekonomi Jepang. LSMCIPESS ini merupakan sebuah hukum yang mengizinkan Jepang untuk melakukan sanksi ekonomi terhadap negara lain tanpa meminta persetujuan dari PBB.

Utara meminta kepada Jepang untuk memberikan kompensasi keuangan sebesar US\$5 - US\$10 miliar, dan Korea Utara juga menuntut Jepang untuk meminta maaf kepada bangsa Korea Utara atas kekuasaannya dimasa perang (Manyin, 2003, p.1). Sikap Jepang dirasa tidak adil bagi Korea Utara, karena Jepang telah memberikan kompensasi keuangan kepada Korea Selatan sejak tahun 1965 ketika akan memulai pembukaan normalisasi hubungan kedua negara. Namun, kompensasi yang diminta oleh Korea Utara sangat besar bagi Jepang, karena pada saat itu Jepang memberikan kompensasi keuangan kepada Korea Selatan sebesar US\$800 juta (Manyin, 2003, p.16). Permintaan dengan jumlah yang besar ini dirasa tidak akan dikabulkan oleh pemerintah Jepang. Karena Indonesia pernah mengajukan tuntutan kompensasi perang sebesar US\$ 17,5 miliar harus cukup puas hanya dengan US\$ 800 juta (Rosidi, 1981, p.67).

Tetapi, bila saja Jepang mau memberikan kompensasi tersebut, tentu saja Korea Utara akan lebih terbuka dan kasus penculikan ini akan mengalami kemajuan. Sebenarnya, Jepang mau memberikan kompensasi keuangan kepada Korea Utara apabila hal tersebut akan berdampak positif bagi kemajuan kasus penculikan. Namun, terdapat hal lain yang mengkhawatirkan Jepang, yaitu jika Jepang memberikan kompensasi dalam bentuk bantuan keuangan, maka Jepang khawatir nantinya akan dipergunakan untuk memperbesar kekuatan militer dan juga akan digunakan untuk memperkuat program nuklir dan rudal Korea Utara. Tentu saja hal ini nantinya justru akan berdampak negatif kepada keamanan wilayah dan bangsa Jepang.

Namun, apabila Jepang tidak segera memenuhi permintaan Korea Utara tersebut, maka kasus penculikan akan berjalan lambat dan sanksi ekonomi yang dilakukan Jepang juga tidak akan efektif. Karena, jika dibandingkan dengan negara lainnya, bantuan kemanusiaan yang diberikan Jepang tidaklah besar jika dibandingkan dengan bantuan dari negara lainnya. Contohnya saja, pada tahun 1995 Jepang memberikan bantuan pangan kepada Korea Utara sebesar 766,000 MT (*Metric Ton*). Sedangkan Amerika Serikat memberikan bantuan pangan sebesar 1,7 juta MT dan Korea Selatan memberikan bantuan sebesar 1.5 MT. Kemudian dalam negosiasi Jepang pada tahun 2004, mengenai pengembalian keluarga korban penculikan, Jepang menjanjikan akan memberikan bantuan

pangan sebesar 250.000 ton, jumlah ini terbilang kecil dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Korea Selatan sebesar 400,000 ton setiap tahunnya. Apabila Jepang benar-benar ingin diplomasi ekonominya efektif, maka Jepang juga harus dapat membendung bantuan dari negara lainnya.

Jepang memang terkenal sebagai negara yang hanya mementingkan keuntungan dalam negeri semata. Jepang selama ini menjalankan strategi nasional yang lebih mengkonsentrasikan diri hanya pada pembangunan ekonomi dan perdagangan Internasional. Jepang kemudian mendapat julukan sebagai “raksasa ekonomi yang tidak memiliki kekuasaan politik.” Sebagai akibatnya, Jepang harus menghadapi sikap negara-negara lain di dunia terutama dari negara-negara Barat, yang mengkritiknya sebagai negara yang hanya memperhatikan kepentingan sendiri untuk memperkaya diri tanpa memperhatikan situasi politik yang berkembang di dunia. Bahkan Jepang oleh beberapa negara di tahun 1970-an dijuluki sebagai “*Economic Animal*” (Irsan, 2007, p.76).

4.2.2 Diplomasi Melalui Forum Multilateral

Penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara merupakan sebuah pelanggaran martabat manusia, hak azazi dan kebebasan, dan kasus penculikan ini juga telah menjadi perhatian masyarakat Internasional. Dalam pertemuan bilateral kedua negara, Jepang tidak memperoleh hasil yang memuaskan dan perkembangan kasus ini juga dirasa sangat lambat. Oleh karena itu, Jepang melakukan strategi lain yaitu dengan menggunakan kekuatan negara lain untuk mendapatkan dukungan sehingga negara-negara tersebut ikut menekan Korea Utara.

4.2.2.1 Amerika Serikat

Sejak tahun 1997, Perdana Menteri Jepang Hashimoto Ryutaro meminta dan menekankan kepada Presiden Amerika Serikat Bill Clinton untuk mendukung posisi Jepang dalam permasalahan kasus penculikan warga negara Jepang. Hal ini dilakukan Jepang adalah karena Amerika Serikat juga memiliki kepentingan

terhadap Korea Utara, yaitu usaha penghentian program nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara. Pada saat itu, Amerika Serikat tidak langsung menanggapi, karena merasa bahwa kasus penculikan tidak lebih penting dari program nuklir yang dimiliki Korea Utara. Namun, pada tahun 1999, Amerika Serikat terlihat mulai memperlihatkan keinginan untuk membantu Jepang dalam kasus penculikan ini. Hal ini dipicu dengan peluncuran rudal Korea Utara pada tahun 1998. Saat itu Clinton mengatakan bahwa:

“If you believe that there are Japanese people who were abducted and taken to North Korea, I think you should keep working on it and looking until you find them alive or you know where they’re buried. And I will support that very, very strongly” (Niksich, 2002, p.13).

Terjemahan: “Jika Jepang yakin bahwa memang telah terjadi penculikan dan korban tersebut dibawa ke Korea Utara, saya rasa Jepang harus bekerja keras untuk hal ini dan mencari hingga menemukan mereka dalam kondisi hidup atau menemukan dimana makam mereka. Dan apabila hal tersebut terbukti, saya akan sangat, sangat mendukung Jepang.”

Permohonan Jepang tersebut baru didapat pada akhir tahun 2000. Pemerintah Amerika Serikat mengangkat kasus ini dalam kunjungannya ke Pyongyang, pada saat itu pemerintahan Clinton menempatkan kasus penculikan ini didalam agenda Perdana Menteri Albright yang akan mengunjungi Pyongyang pada tahun 2000. Ini merupakan kemajuan besar dalam diplomasi Jepang dengan Amerika Serikat sejak perjanjian Jepang-Amerika Serikat tahun 1971 (Niksich, 2002, p.22).

Pernyataan Clinton pada tahun 1999 seakan terbukti. Karena hingga saat pemerintahan G.W Bush, Jepang didukung oleh Amerika Serikat dalam hal penyelesaian kasus penculikan. Pembicara dari pemerintahan Bush, Sean McCormack mengatakan bahwa:

“We fully support the Japanese in raising this issue and seeking a resolution to it. We understand that it's a very emotional issue for the Japanese people. [...] We would hope that there is a resolution to the issue, he said. It's important for the Japanese people, it's important for the Japanese government” (*U.S Renew*, 2005, para2-3).

Terjemahan: “Kami mendukung Jepang dalam kasus ini dan mencoba untuk mencari resolusinya. Kami memahami bahwa kasus ini merupakan hal yang sangat emosional bagi bangsa Jepang. [...] Ia juga mengatakan, kami berharap bahwa akan ada solusi untuk kasus ini. Kasus ini penting bagi masyarakat Jepang dan juga penting bagi pemerintah Jepang.”

Disaat pertemuan G8, Presiden Bush juga mengatakan bahwa ia sangat mendukung Jepang dalam menyelesaikan kasus penculikan ini (*US, Japan Call for*, 2007, para.7):

"And it's very important for the Japanese people to know that I strongly support Shinzo Abe's desire to deal with this very important issue... the abduction issue."

Terjemahan: “Sangat penting bagi masyarakat Jepang untuk mengetahui bahwa saya sangat mendukung keinginan Sinzo Abe untuk mencapai kesepakatan terhadap permasalahan yang sangat penting ini.... yaitu permasalahan penculikan.”

Sejak tahun 1988, ketika terjadi peledakan pesawat KAL 858 pada tahun 1987, pemerintah Amerika Serikat menetapkan Korea Utara sebagai negara yang ikut mendukung dan mendanai terorisme di dunia (Lee dan Choi, 2007, p.8). Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2001, NARKN dan AFVKN meminta

kepada pemerintah Amerika Serikat untuk memasukkan kasus penculikan ini sebagai salah satu bentuk nyata terorisme Korea Utara. Presiden Bush menerima permintaan tersebut dan menetapkan Korea Utara sebagai negara terorisme global pada tahun 2003 dan 2004. Keseriusan Amerika Serikat dalam membantu Jepang juga terlihat pada bulan Oktober 2004, dimana kongres Amerika Serikat sepakat bahwa bantuan ekonomi terhadap Korea Utara akan diberikan apabila kasus penculikan warga negara Jepang mengalami kemajuan. Pemerintah Amerika Serikat juga akan mengambil tindakan untuk menekan Korea Utara (*Worldwide*, 2006, para.11).

Pada bulan April 2006, Sakie Yokota (ibu dari Megumi Yokota dan juga merupakan perwakilan dari AFVKN) dan Shimada Yoichi (perwakilan dari NARKN) datang ke Amerika Serikat untuk memberikan kesaksian didepan kongres pelanggaran hak azazi manusia di Korea Utara. Sakie juga bertemu dengan Presiden Bush untuk menjelaskan kepada pemerintah Amerika Serikat, bagaimana kasus penculikan tersebut dan juga menyatakan bahwa kasus penculikan merupakan kasus yang penting bagi bangsa Jepang. Kunjungan ini dilakukan juga untuk mengharapkan simpati dari masyarakat Amerika agar mendukung penyelesaian kasus penculikan ini.

Peranan lainnya dari Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus penculikan ini terlihat dari terbentuknya sebuah asosiasi kerjasama antara Jepang dan Amerika Serikat dalam mencari informasi mengenai korban penculikan. Asosiasi tersebut adalah ReACH (*Rescuing Abductees Center for Hope*). Selain itu, Amerika Serikat juga membuat film tentang salah satu kasus penculikan, dengan judul *Abduction-The Megumi Yokota Story* pada tahun 2006. Film ini dibuat adalah untuk menarik perhatian masyarakat Amerika Serikat dan Internasional. Seorang penyanyi dari Amerika Serikat, Mr. Noel Paul Stookey juga bersimpatik dengan kasus penculikan ini khususnya Megumi Yokota dan ia menciptakan sebuah lagu yang berjudul *Song for Megumi*.

4.2.2.2 Melalui *Six Party Talks*

Untuk dapat menyelesaikan kasus ini, maka Jepang mencari dukungan melalui forum multilateral seperti *Six Party Talks*. *Six Party Talks* merupakan pertemuan enam negara antara Amerika Serikat, Jepang, Cina, Rusia, Korea Utara dan Korea Selatan untuk membicarakan mengenai program nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara (*Nuclear Non-Proliferation Treaty* [NPT]). Pertemuan *Six Party Talks* ini dimulai sejak tahun 2003. Pertemuan ini telah dilakukan sebanyak enam putaran hingga tahun 2007. Meskipun pertemuan ini membicarakan mengenai program nuklir yang dimiliki Korea Utara, tetapi masing-masing negara mempunyai permasalahan lain yang diangkat dalam pertemuan ini. Seperti antara Jepang dan Korea Utara diberi kesempatan untuk membicarakan mengenai permasalahan yang terjadi diantara kedua negara, yaitu kasus penculikan yang hingga kini masih belum menemukan penyelesaiannya (Avery, 2008, p.4).

Sejak dimulainya pertemuan *Six Party Talks*, Jepang mengangkat kasus penculikan warga negaranya dalam pertemuan ini untuk mendapatkan simpatik dari para anggota dengan harapan negara-negara ini juga dapat memberikan tekanan kepada Korea Utara, terutama kepada Cina dan Korea Selatan yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Korea Utara. Pada tahun 2005, negara-negara dalam *Six Party Talks* ini memberikan resolusi bagi Jepang, yaitu (*Japan's Hard Line*, 2005, p.2):

1. Jepang harus mengupayakan membentuk sebuah sistem pertahanan misil yang efektif. Sebuah pertahanan misil didukung dengan kekuatan konstitusi perdamaian yang dimiliki oleh Jepang akan memberikan peluang besar dalam menjaga keamanan nasionalnya. Jepang harus mempersiapkan untuk memulai rencana pembentukan sistem pertahanan misil tersebut pada tahun 2007.
2. Pemerintah Jepang harus lebih sering melakukan dialog dengan para korban penculikan (yang selamat) dan berupaya mengambil langkah lain yaitu mendapatkan informasi dari masyarakat Korea Selatan yang juga menjadi korban penculikan.

3.

ntuk menempatkan kasus penculikan sebagai kasus pelanggaran hak azazi manusia dalam hal untuk mendapatkan dukungan Internasional, Jepang harus melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi untuk mempertinggi kredibilitasnya. Yaitu, dengan merubah lemahnya kebijakan hukum Jepang terhadap perdagangan manusia (*Human Trafficking*) dan eksploitasi seksual. Hukum ini harus dirubah secepatnya seperti hukum yang terdapat di Amerika Serikat, namun sementara proses perubahan hukum ini sedang dilakukan, kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran hak azazi manusia lainnya semakin banyak terjadi.

Pada tahun 2005, Keterlibatan Jepang dalam *Six Party Talks* tidak disetujui oleh Korea Utara. Karena dalam pertemuan tersebut Jepang selalu menekan Korea Utara dalam kasus penculikan warga negara Jepang. Korea Utara mengatakan bahwa Jepang telah keluar dari jalur utama pertemuan *Six Party Talks*. Korea Utara juga mengatakan bahwa topik penculikan dapat mempersulit atau memperlambat proses perundingan enam negara ini. Jepang melakukan taktik dengan cara menggunakan *Six Party Talks* untuk mendapatkan solusi dari kasus penculikan ini.

Pada bulan Januari 2008, disaat Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda datang mengunjungi Cina dalam hal pembicaraan hubungan kedua negara, Jepang mengangkat permasalahan penculikan ini. Pada kesempatan tersebut, Perdana Menteri Cina Wen Jiabao mengatakan bahwa ia memahami bagaimana posisi Jepang dan ia percaya bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara berdialog. Begitu juga dengan Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak mengatakan bahwa Korea Selatan mengerti dan mendukung Jepang dalam menyelesaikan kasus penculikan tersebut (Avery, 2008, p.6).

4.2.2.3 Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sejak tahun 2003, resolusi dari pemecahan masalah hak azazi manusia di Korea Utara, di ambil dari komisi hak azazi manusia PBB. Pada tahun 2005 dan

2006, majelis umum PBB mengangkat permasalahan hak azazi manusia di Korea Utara ini dalam Sidang Paripurna. Khususnya pada tahun 2006, resolusi ini selanjutnya diperkuat dengan ketentuan yang menyatakan bahwa kasus penculikan merupakan konsentrasi Internasional dan merupakan pelanggaran hak azazi manusia dari sebuah bangsa.

Pada akhir tahun 2007, Majelis Umum PBB mengambil sebuah resolusi untuk memberikan hukuman kepada Korea Utara, akibat tindakan kriminalnya yaitu melakukan tindakan penculikan terhadap negara asing, dimana kasus ini melanggar hak azazi manusia sebagai sebuah bangsa dari negara yang berdaulat. PBB memanggil pemerintah Korea Utara untuk segera memutuskan persoalan ini, menyelesaikannya secara jujur dan menjamin korban-korban tersebut dapat kembali secepatnya. Pada tanggal 15-19 Januari 2008, Professor Vivit Muntarbhorn, seorang peneliti khusus PBB yang meneliti mengenai hak azazi manusia di Korea Utara datang ke Jepang. Kunjungan ini dilakukan untuk menilai dampak dari permasalahan hak azazi manusia dari Korea Utara di Jepang. Ini merupakan kunjungan ketiganya setelah kunjungan sebelumnya pada bulan Febuari 2005. Setelah mendapatkan keterangan dari pihak Jepang, Professor Vivit Muntarbhorn menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara adalah sebuah tindakan pelanggaran hak azazi manusia dan telah melanggar *UN Security Council Resolution 1718*. Dari penelitian tersebut, PBB menekankan kepada Korea Utara (*Special Rapporteur*, 2008, para.2-11):

1.

BB menekankan kepada Korea Utara untuk memperlihatkan rasa tanggung jawabnya terhadap kepentingan kasus penculikan ini, terutama memperlihatkan respon positif dengan memberikan bukti nyata mengenai kasus dan korban penculikan, dengan memperhatikan keselamatan dari para korban penculikan. Kemudian dengan segera mengembalikan korban penculikan tersebut dan memberikan hukuman bagi pelaku penculikan.

2.

BB mendukung berbagai macam cara untuk menyelesaikan permasalahan penculikan ini dengan perdamaian yang didasarkan pada hukum Internasional dan menyoroti pertanggung jawaban negara dan pertanggung

jawaban pelaku penculikan dari Korea Utara. Dan menyatakan kesediaannya untuk menyelesaikan kasus ini secara terbuka didalam *Six Party Talks* ataupun dalam forum lainnya.

3.

BB meminta kepada masyarakat Internasional juga ikut menekan Korea Utara dalam hal penyelesaian kasus penculikan ini agar kasus ini dapat selesai dengan cepat dan efektif.

4.

BB menyambut baik kemungkinan hukum yang dibuat Jepang pada tahun 2006, mengenai pemberian perlindungan bagi rakyat Korea Utara yang mendapatkan pelanggaran hak azazi manusia di Korea Utara dan memberikan suaka untuk melindungi sebuah kelompok ataupun perorangan.

5.

BB menganjurkan agar Jepang menandatangani perjanjian Internasional bagi perlindungan seluruh bangsa dan mengundang seluruh negara untuk meratifikasi perjanjian ini.

6.

BB menegaskan agar Jepang terus memberikan dan mendukung kebutuhan bantuan bagi seluruh korban hak azazi manusia di Korea Utara, baik korban dalam hal kekerasan secara fisik, psikologi dan korban lainnya, dan memberikan perlindungan bagi para korban tersebut.

4.2.2.4 Pertemuan G8

G8 ini terdiri dari 8 negara anggota yaitu, Canada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat. Namun, diluar 8 negara tersebut, terdapat negara lainnya yang ikut dalam pertemuan ini, seperti Brazil, Cina, India, Indonesia, Malaysia, Meksiko, Korea Selatan dan Afrika Selatan. Selain itu, pertemuan G8 in juga melibatkan organisasi Internasional seperti Komisi AU, Sekretariat ASEAN, OECD, UNDP, UNESCO, UNICEF, WHO dan Bank Dunia.

G8 adalah pertemuan delapan negara yang membicarakan mengenai isu-isu penting yang berkembang dimasing-masing negara anggota (terutama mengenai permasalahan ekonomi). Dalam pertemuan ini, masing-masing negara memaparkan permasalahan yang terjadi di negaranya baik itu kasus dalam negeri ataupun kasus bilateral yang menyangkut dengan negara lain. Bagi Jepang, meskipun dalam pertemuan ini didominasi oleh Perdana Menteri dan Kementerian Luar Negeri (MOFA), tetapi partisipan dari non pemerintahan juga dapat berpartisipasi dalam pertemuan ini. Termasuk kementerian lainnya, partai oposisi, asosiasi bisnis dan kelompok yang mewakili masyarakat domestik dan Internasional. Pertemuan G8 telah dilakukan sebanyak 29 kali dari tahun 1975 hingga tahun 2008.

Pada pertemuan G8 tanggal 1-3 Juni 2003 di Prancis, Menteri Luar Negeri Jepang Kawaguchi Yoriko, berhasil mendapatkan perhatian dari negara-negara anggota G8 dalam kasus penculikan warga negara Jepang oleh agen rahasia Korea Utara yang terjadi pada tahun 1970-an hingga 1980-an (*Racchi Jiken*). Di hari kedua dalam pertemuan ini, Perdana Menteri Jepang Koizumi Junichiro mengangkat kembali kasus penculikan pada pertemuan yang diperuntukkan khusus bagi kepala negara. Sepanjang pertemuan ini, Koizumi menekankan terhadap kasus penculikan. Hal ini dilakukan Koizumi adalah untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari masing-masing negara anggota. Sehingga pada akhir pertemuan kepala negara tersebut menyatakan (Dobson, 2004, p.4):

“G8 Foreign Minister supported the efforts made by the different parties to seek a comprehensive solution by peaceful means to the North Korean nuclear issue and to other matters including unresolved humanitarian problems such as the abduction issue.”

Terjemahan: “Kementerian Luar Negeri G8 mendukung upaya yang dilakukan negara lain (Jepang) untuk mencari solusi bagi keamanan negeri dari Korea Utara dan kasus lainnya termasuk

permasalahan kemanusiaan yang belum terselesaikan seperti kasus penculikan.”

Ini adalah kali pertamanya Jepang mendapatkan dukungan dari para anggota G8 dalam kasus penculikan. Dukungan dari G8 ini mendapatkan reaksi positif dari masyarakat Jepang, mereka berharap kasus ini akan semakin mempercepat penyelesaian kasus penculikan ini.

Pada pertemuan G8 selanjutnya pada tahun 2007, di Heiligendamm, Jerman, Perdana Menteri Shinzo Abe mengangkat kembali kasus penculikan. Shinzo Abe mengatakan bahwa ia mengangkat kasus penculikan ini adalah karena kasus penculikan ini tidak hanya menjadi permasalahan bagi Jepang saja, tetapi permasalahan ini merupakan permasalahan negara lainnya karena penculikan melibatkan beberapa negara lainnya di dunia. Respon dari G8 terhadap pernyataan Abe tersebut adalah negara G8 menetapkan kasus penculikan ini kedalam kasus kebijakan luar negeri dan kasus keamanan dalam agenda pertemuan G8. Negara-negara G8 memberikan tekanan kepada Korea Utara tidak hanya dalam permasalahan nuklir dan rudal saja, tetapi juga terhadap kasus penculikan dan meminta kepada Korea Utara agar segera menyelesaikan kasus penculikan tersebut.

Kasus penculikan ini akan diangkat kembali oleh Jepang dalam pertemuan G8 selanjutnya pada bulan Juli 2008 di Jepang pada *Hokkaido Toyako Summit*.